

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA KABUPATEN SOPPENG

AHYADI JUSAEMAN



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA DI KABUPATEN SOPPENG

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

AHYADI JUSAEMAN
A111 10 270



Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA DI KABUPATEN SOPPENG

disusun dan diajukan oleh

AHYADI JUSAEMAN
A111 10 270

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 07 Januari 2014

Pembimbing I



Dra. Hj. Fatmawati, M.Si.
NIP. 19640106 198803 2 001

Pembimbing II



Suharwan Hamzah, SE., M.Si.
NIP. 19791116 200812 1 001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA.
NIP. 19630625 198703 2 001

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA DI KABUPATEN SOPPENG

disusun dan diajukan oleh

AHYADI JUSAEMAN
A111 10 270

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **28 Januari 2014** dan
telah dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Fatmawati, M.Si.	Ketua	1. 
2. Suharwan Hamzah, SE., M.Si.	Sekretaris	2. 
3. Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA.	Anggota	3. 
4. Dr. H. Madris, DPS., M.Si.	Anggota	4. 
5. Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si.	Anggota	5. 

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA.
NIP. 19630625 198703 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AHYADI JUSAEMAN

NIM : A111 10 270

Jurusan/program studi : ILMU EKONOMI/STRATA SATU (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA DI KABUPATEN SOPPENG

adalah karya ilmiah saya sendiri dengan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ciplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Januari 2014

Yang membuat pernyataan,

AHYADI JUSAEMAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dan kemuliaan yang agung penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas Rahmat, Anugerah dan Perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Modal Manusia di Kabupaten Soppeng”** ini sesuai pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

- Ibu Prof. DR. Hj. Rahmatia, MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.
- Ibu Dra. Hj. Fatmawati, M.Si. selaku pembimbing I, yang tak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan, do'a, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama masa menempuh studi di Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Suharwan Hamzah, SE., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Bapak DR. H. Abd. Hamid Paddu, MA. dan Ibu DR. Hj. Indraswati Tri Abdi Reviani Darwis, MA., serta Bapak DR. Muh. Syarkawi Rauf, SE.,ME. yang telah mendidik, memberi motivasi, serta semangat masa depan kepada penulis.
- Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih atas pembelajaran selama tahun kuliah penulis.
- Pak Umar, Pak Parman, Pak Akbar, Pak Safar, Ibu Ida dan seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi Unhas yang senantiasa memberi bantuan kepada penulis selama ini.
- Rasa hormat dan bakti kepada guru-guruku di **TK Aisyah Bustanul Atfal Lajoa, SD 211 Attang Benteng, MTs. As'adiyah Putera I Sengkang,** dan **SMA Negeri 1 Liliriaja** yang telah menanamkan pondasi ilmu dan akhlak dalam menempuh hidup, hingga dapat masuk keperguruan tinggi, serta meraih cita-cita. Semoga Allah SWT tetap melindungi dan memelihara mereka serta membalas segala budi baiknya.
- Lavie, Wahyu Nurmasari, Mas Erdimas, Mas Sekar, Kang Arham serta seluruh teman-teman di **Insitut Manajemen Telkom (IMTelkom) jurusan Akuntansi angkatan 2009** terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi, serta semangatnya sehingga penulis dapat kembali melanjutkan perkuliahan meski di tempat yang berbeda.

- Seluruh Keluarga besar “**Spultura 2010**”, Kak Kusumawardhani, Sri Wahyuni, Sri Fatmasari Syam, Indah Gita Cahyani, Amalia Nurul Alifa, Laura Virginia Sallolo, Dian Aziza JS., Muhammad Nakib Rabbani, Kevin Tjandra, Sukmawan, Liliyani, Herianto S., Surya Ariwirawan, Vina Tamaya, Restuti Anggereny Rumahorbo, Jennifer M A Parung, Tri Septia Nugraha, Eva Irwanti, Sulkifli Budiman, Muh. Ilham, La Caesar Muhammad Muttaqien, M. Rivqi Islan Amin, Muh. Ainul Yakin, Sri Raehana, Fatmawati, Rony Wijaya, Teguh Susilo Toni, Munawiruddin, Yeni Masni, Yudi Pratama, Ahmad Faqhruddin Abdu-Rabb, Fajariah, Yusri Pasolang, Yumni Wikarsih, M. Zaenal, Patotori, Muthya Nurfitriani R., Fuad Dwi Darmawan, Dede Darmanto, Sudirman Kahar, Monica Cahya Dini, Rifqa Latifadina, Ikram Sutanto, Ahmad Nurhanif, Ashar, Andi Tri Dharmanasatya, Muh. Nizar Ramadhan, Elvira Fransiska Arruan, Ayu Yustika, Salman Samir, dan Wahyudi Husain. Terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi, dan semangat serta kesabarannya selama kuliah hingga saat ini kepada penulis. Semoga gelar sarjananya cepat tercapai, dan kita persembahkan serta amalkan ilmu yang kita dapat kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta agama.

- Seluruh keluarga besar “**Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS)**”, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan semangatnya. Semoga ilmu yang didapatkan dapat kita amalkan dan persembahkan di Bumi Latemma'mala. *Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Universitas Hasanuddin. Bersatu dalam tekad menuju masa depan, demi pembaharuan, demi daerahku, generasi tercinta Wija' Latemma'mala. Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Universitas Hasanuddin. Mewujudkan semangat pengabdian yang mulia, untukmu Soppengku. Kami siap korbankan jiwa dan raga ini untuk perubahan. Ku abdikan semua hidup ini, Ku amalkan ilmu yang kudapat dengan semangat “YASSISOPPENGI”.*
- Keluarga baru di KKN Unhas Gelombang 85 Posko Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Yulianti Saputri, C.ST. (SekDes), C.drg. Kurnia, S.KG. (BenDes), Alisyia, C.SS. (Anggota), Yusuf Jaya, C.S.Sos. (Anggota), Bpk. Talib (Kepala Desa Urasa) beserta keluarga, dan seluruh warga desa Uraso yang telah banyak memberikan pembelajaran tentang arti masyarakat dan keluarga yang sesungguhnya.
- Teman-teman seperjuangan sewaktu Ujian Proposal (Kak I We Maratika, C.SE. dan Restuti Rumohorbo, C.SE.) tetap semangat selesaikan Skripsinya!! Dan juga teman-teman seperjuangan sewaktu Ujian Skripsi (Kak Nurhidayah Ilham, SE. yang sudah banyak membantu, menemani, dan menyemangati saat detik-detik terakhir persiapan Ujian Skripsi, Kak Tika Maulidya, SE., Kak Muh. Furqon Amansyah, SE., dan Kak Aidil Akbar, SE.

- Sahabat, teman, dan pihak-pihak yang mungkin tak bisa disebutkan satu per satu. Namun kebaikan-kebaikan dari nama-nama yang tidak tertulis disini, insya Allah tetap dicatat oleh malaikat-malaikat-Nya. Terima kasih semuanya.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan makna positif bagi perkembangan Ilmu Ekonomi. Amin.

Makassar, 22 Januari 2014

AHYADI JUSAEMAN

Kupersembahkan Kepada:

- *Kedua orang tuaku, ayahanda **Jusaeman Sahar** dan ibunda **Hj. Rosnawati Tike** beserta keluarga besarku dari pihak **H. Saleng / Hj. Harta (SAHAR)** dan **Tike / Pattola** atas doa, jasa, perhatian, bimbingan, pengorbanan, kesabaran, keikhlasannya dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya dicurahkan demi mewujudkan masa depan yang lebih baik buat saya, tak banyak yang dapat saya lakukan untuk dapat membalas segala pengorbanan dan kasih sayang mereka selain doa yang tulus dan ikhlas kepada ALLAH SWT agar beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan dan selalu dalam lindungan_Nya.*
- *Saudara-saudariku tercinta **Nini Winarni, S.Si., Apt., La Tuo, SS., M.Si., Muh. Rayhan Aditya**, dan ponakanku tersayang **Achmad Ryu Alkhalifi**, serta **Bunda Etik Aminingsih** atas bantuan, kasih sayang, doa, dan motivasinya dalam segala hal.*

- *Almh. Dra. Hj. Justia (Tante Etti) dan Almh. Musriani Mide, S.Pd. (Deng Unie) yang selama hidupnya selalu memberi motivasi serta bantuan kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan. “Kini kalian telah tiada, namun ku yakin di sana kalian pasti tersenyum bangga”. Semoga arwah mereka senantiasa mendapat perlindungan di sisi Allah SWT (Al_Fatihah..).*

- *Saudara-saudariku “WHITE HOUSE”, terima kasih telah menjadi teman terbaikku (Meskipun kita PUTIH namun kalian mampu memberi berjuta warna dalam NTI DB.25). Kelak kita akan menjadi generasi “Pattola Palallo” (generasi yang lebih sukses dari kedua orang tuanya):*
 1. *Muh. Nizhard Ramadhan, C.SE. yang selalu meluangkan waktu, selalu menemani, siap untuk diculik, siap untuk ditahan kapanpun ia mau (Salah!! Mestinya kapanpun saya mau). Jadi apa yang telah engkau berikan?? (Jawab!! Agar ngana pee bisa selalu ingat kamu punya pemberian ke ngana dan ngana melupakan pemberian ngana ke kau!! Supaya ngana pee kelihatan Ikhlas!! hahahaha). Namun, apalah jadinya aku tanpa*

kau (Lebay!!). Big Broo yang satu ini memang BESAR (dia peee punya body) dan akan selalu BESAR sampai kapan pun, namun kelak dia akan menjadi orang BESAR, paling KECIL dia jadi CEO (Chief Executive Officer/Presiden Direktur) (Yakin!!).

2. **Rifqa Latifadina, C.SE.** yang selalu memberikan ceramah, kultum, motivasi, serta semangat yang luar biasa. Dia selalu setia mendengar curahan hatiku (Ciiee salah!! Yang ada dia yang kebanyakan curhat masalah hati, perasaan, dan kehidupan. Saya banyak belajar dari Kisahmu). Fie', kamu itu wanita paling tangguh, kuat, kokoh, serta berdiri tegak (kayak iklan saja) yang pernah saya temui namun kau tetap lemah lembut (bede'), kelak akan ada NOVEL yang bercerita tentang Kisahmu (Yakin!!)

3. **Muthya Nurfitriani R. C.SE.** yang selalu total saat memberikan bantuan (tidak tanggung-tanggung), selalu memberikan saran serta masukan dalam mengambil sebuah keputusan. Dia cukup lihai dan kepo dalam mengamati sesuatu, bahkan sampai ke akar-akarnya (Cocoklah jadi Detektif!!)

4. **Herianto, C.SE.** yang selalu siap untuk menegur dan mengingatkan. Jama-jamani masitta SKRIPSImu, tinggalkan SBOBET. Sesungguhnya Sbobet itu menyesatkan, tidaklah ada orang yang berhasil karenanya. (Catat!!)
5. **Muh. Ilham, C.SE.** yang selalu berbagi pengalaman dan pengetahuan (hahahahaa....hanya dia dan Heri yang tau tentang ini). Dia juga seorang motivator yang handal (Bisalah menyaingi Mario Teguh Golden Ways).
6. **Sukmawan, C.SE.** yang selalu setia untuk membagi kegalauannya. Ada baiknya fikirkan itu skripsi dari pada fikirkan anaknya orang yang belum jelas (suka sama anda!!) hahahaha.... Ingat orang tuamu bebh!!
7. **Munawiruddin, C.SE.** yang selalu membagi ilmunya, terkhusus ilmu Sbobet. Ingat Mulee, lupakan Sbobet!!
8. **Kamaruddin, C.S.Sos.,** kelak ia akan menjadi seorang **Bhayangkara harapan bangsa. Pengemban tugas mulia. Berasaskan tribata. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna. Menegakkan hukum negeri. Menjadi pandu pertiwi (Yakin!!).**

9. **C.drg. Herawati Hasan, S.KG.** *Sappiseng (baru) yang sangat pengertian!! Kenal sama dia bagaikan “Lino Silebbak Daun Kilor”, terlalu banyak hal kebetulan yang tak terduga. Dan dia harus bertanggung jawab atas ulah yang dia perbuat!! (memperkenalkanku dengan seorang sahabatnya dan menitipkannya kepadaku).*
10. **C.drg. Kurnia, S.KG.** *Tiada kata yang mampu ku rangkai untukmu!! Selain, sebuah harapan “Kau” dan “Aku” kelak menjadi “Kita” (Lebay!!).*

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA DI KABUPATEN SOPPENG

Ahyadi Jusaeman

Hj. Fatmawati

Suharwan Hamzah

Penelitian ini bertujuan menganalisa besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendapatan per kapita terhadap mutu modal manusia (indeks pendidikan) di kabupaten Soppeng tahun 2003-2012.

Hasil penelitian ini menggunakan model analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa selama periode penelitian variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap mutu modal manusia (indeks pendidikan) di kabupaten Soppeng, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap mutu modal manusia (indeks pendidikan) di kabupaten Soppeng, dan untuk pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita, untuk pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Selanjutnya, pendapatan perkapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap mutu modal manusia (indeks pendidikan) di kabupaten Soppeng selama periode 2003-2012.

Kata Kunci : Mutu Modal Manusia (Indeks Pendidikan), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Pendapatan per Kapita.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE INCREASING OF HUMAN RESOURCE QUALITY IN SOPPENG DISTRICT

Ahyadi Jusaeman

Hj. Fatmawati

Suharwan Hamzah

The objectives of this research is determine the impact of government expenditure in educations sector, government expenditure in healths sector, income per capita to human resource quality (education indeks) in soppeng district 2003-2012

Result of this research using multiple linear regression model analysis shown that during research period government expenditure educations sector variable is not influence to quality of human resource (education indeks) in soppeng district. Whereas government expenditure health sector significant positive influence to quality of human resource (education indeks) in soppeng district, and for government expenditure education sector significant positive influence to income percapita. Furthermore, income percapita positive influence but not significant to quality of human resource (education indeks) in soppeng district during 2003-2012.

Key word: quality of human resource (education indeks), government expenditure education sector, government expenditure health sector, and income percapita.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Manusia sebagai Modal Pembangunan	10
2.1.1.1 Modal Manusia (<i>Human Capital</i>).....	13
2.1.1.2 Indeks Pendidikan	16
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah	21
2.1.3. Pendapatan Per Kapita	25
2.1.4. Hubungan Variabel	27
2.1.4.1 Efek Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Mutu Modal Manusia (Indeks Pendidikan)	27

2.1.4.2	Efek Pendapatan per Kapita terhadap Mutu Modal Manusia (Indeks Pendidikan)	30
2.2	Kajian Empiris	31
2.3	Kerangka Pikir.....	34
2.4	Hipotesis	37
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Lokasi Penelitian	38
3.2	Metode Pengumpulan Data	38
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4	Metode Analisis	39
3.5	Pengujian Kriteria Statistik	41
3.5.1	Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F).....	41
3.5.2	Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	42
3.5.3	Koefisien Determinasi (R^2)	44
3.6	Definisi Operasional	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Perkembangan Variabel Penelitian	46
4.1.1	Perkembangan Indeks Pendidikan (Mutu Modal Manusia)	46
4.1.2	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Kabupaten Soppeng Periode 2002-2012	49
4.1.3	Perkembangan Pendapatan per Kapita di Kabupaten Soppeng Periode 2002-2012	52
4.2	Analisis Data	55
4.2.1	Hasil Uji Statistik	55
4.2.1.1	Koefisien Determinasi (Uji R^2)	55
4.2.1.2	Pengujian Signifikansi Secara Simultan (Uji F)	56
4.2.1.3	Pengujian Signifikansi Secara Parsial (Uji t)	58

4.2.2 Interpretasi Model	60
4.2.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) terhadap Pendapatan Perkapita (Y_1)	60
4.2.2.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2), Pendapatan Per Kapita (Y_1) Terhadap Mutu Modal Manusia (Indeks Pendidikan) (Y_2)	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1.1	Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2006-2011	4
Tabel 4.1	Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012	47
Tabel 4.2	Realisasi APBD untuk Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Kabupaten Soppeng, tahun 2002-2012.....	50
Tabel 4.3	Pendapatan per Kapita Kabupaten Soppeng, tahun 2002-2012	53
Tabel 4.4	Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$) untuk Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y_1	58
Tabel 4.5	Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$) untuk Pengaruh X_1 , X_2 , dan Y_1 terhadap Y_2	59
Tabel 4.6	Hasil Perhitungan Statistik untuk Y_1	60
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Statistik untuk Y_2	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1	Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012	49
Gambar 4.2	Perkembangan Realisasi APBD untuk Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Kabupaten Soppeng, tahun 2002-2012	51
Gambar 4.3	Perkembangan Pendapatan per Kapita Kabupaten Soppeng, tahun 2002-2012	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2008.....	79
Lampiran 2	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2009.....	81
Lampiran 3	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2010.....	83
Lampiran 4	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011.....	85
Lampiran 5	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012.....	87
Lampiran 6	Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (<i>Time Lag</i>), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (<i>Time Lag</i>), Pendapatan per Kapita (<i>Time Lag</i>), dan Indeks Pendidikan Tahun 2003-2012.....	89
Lampiran 7	Hasil LN Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendapatan per Kapita, dan Indeks Pendidikan Tahun 2003-2012.....	90
Lampiran 8	Hasil Pengujian dengan Menggunakan EViews 7.0 untuk Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y_1	91
Lampiran 9	Hasil Pengujian dengan Menggunakan EViews 7.0 untuk Pengaruh X_1 , X_2 , dan Y_1 terhadap Y_2	92
Lampiran 10	Surat Izin Penelitian.....	93
Lampiran 11	Surat Bukti Penelitian.....	94
Lampiran 12	Riwayat Hidup.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya modal manusia dalam proses pembangunan di negara berkembang telah dibuktikan banyak studi. Namun ironis, di beberapa negara berkembang, tingginya pendapatan rumah tangga tidak selalu menjamin tingginya tingkat kesehatan. Karenanya modal manusia harus tetap mendapatkan perhatian tersendiri, bahkan di dalam perekonomian yang tumbuh dengan cepat sekalipun. Namun perlu diperhatikan, peningkatan kualitas modal manusia dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan (Todaro, 2003: 405, dalam Sjafii, 2005).

Faktor lain yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan, dimana pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pengukuran modal manusia (*human capital*) bersama dengan kesehatan. Pendidikan dapat menunjang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (Todaro, 2006).

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2006: 434).

Peranan investasi fisik dalam memacu pertumbuhan ekonomi sudah tidak perlu diragukan lagi. Sementara itu pendidikan dan kesehatan merupakan faktor

penting dalam perkembangan manusia sekaligus merupakan penentu dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini mengingat pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada kualitas modal manusia (*human capital*) (Sjafii, 2005).

Mutu modal manusia menurut Mulyadi (2012), merupakan suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi. Pengorbanan (biaya) untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberi hasilnya pada masa mendatang. Oleh karena itu, disini digunakan istilah “modal”. Sumber daya manusia yang sudah mengalami pengolahan lebih lanjut disebut modal manusia. Penggunaan istilah modal manusia juga menyiratkan suatu perhatian pada pengolahan sumber daya manusia, yang merupakan suatu investasi. Karena modal manusia tak dapat diukur, kita tidak mempunyai jumlah modal manusia, tetapi yang dibicarakan mutunya.

Sehingga, dalam membicarakan mutu modal manusia satuan hitung yang paling mencerminkan hal tersebut adalah indeks pendidikan, dihitung berdasarkan dua komponen yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat pengetahuan manusia. Semakin meningkat indeks pendidikan manusia maka semakin tinggi pengetahuannya, dan semakin meningkat pula mutu modal manusia tersebut.

Untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sebagai aset pembangunan dan yang mampu menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Maka sangat diperlukan peran pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan. Karena pada dasarnya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dan merupakan salah satu upaya dalam membangun watak bangsa.

Penduduk Indonesia yang berjumlah besar dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki mutu yang memadai. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penerima manfaat pembangunan. Artinya dengan mutu penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penerima manfaat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Perlu disadari bersama bahwa manusia tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan. Disamping itu muncul juga bahwa pembangunan tidak hanya bisa tergantung pada sumber daya alam. Teknologi sebagai sumber daya pembangunan yang lain memang menjadi penting pula belakangan ini. Namun perkembangan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia.

Pembangunan di Indonesia juga sudah semestinya mengandalkan modal manusia (*human capital*). Dengan tersedianya modal manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Para ahli juga sepakat bahwa mutu modal manusia yang sekarang kita miliki masih perlu ditingkatkan, agar tantangan tersebut bisa teratasi dengan baik.

Kondisi umum pendidikan di Indonesia ditandai oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); sekitar 58 % dari tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau kurang, hanya 4 % yang berpendidikan tinggi. Prospek peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang pun terlihat suram. Rata-rata angka partisipasi pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi masih relative rendah yakni 56 % untuk SLTP, 32 % untuk SLTA dan 12 % untuk perguruan tinggi (Susenas, 2002).

Dalam laporan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, terkait analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011, angka indeks pendidikan Provinsi

Sulawesi Selatan dibandingkan dengan angka nasional masih relatif rendah. Dimana pada level nasional angka tersebut telah mencapai 79,64 sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 76,31 pada tahun 2011.

Nilai indeks pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2007-2011 memperlihatkan suatu gambaran yang sangat memperihatinkan. Karena posisi bidang pendidikan masih berada di level bawah, hal ini dapat dilihat berdasarkan provinsi yang berada di kawasan Timur juga secara nasional. Pemerintah telah merespon baik akan hal ini dan terlihat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 nilai indeks meningkat sebesar 2,75 poin sedangkan nasional hanya meningkat sebesar 1,79 poin. Angka ini memberikan gambaran bahwa ada keseriusan dari pemerintah untuk menaikkan indeks pendidikan.

Untuk melihat perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2006-2011, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2006-2011

Tahun	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan (%)
2006	83,6	6,5	70,2
2007	84,6	6,9	71,6
2008	84,6	6,8	71,6
2009	85,1	7,0	72,24
2010	86,67	7,3	73,90
2011	86,71	7,28	73,99

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (Indeks Pembangunan Manusia)

Secara keseluruhan pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng selama periode 2006-2011 menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini berhubungan langsung dengan perbaikan indikator sosial, yakni angka melek

huruf dewasa terus meningkat seiring meningkatnya angka partisipasi sekolah. Namun juga masih relatif rendah dibandingkan angka indeks pendidikan provinsi.

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, *entrepreneur* untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktifitas suatu negara atau wilayah. Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Penekanan pada investasi modal manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Tanah, tenaga kerja, modal fisik bisa saja mengalami *diminishing return*, namun ilmu pengetahuan tidak (Atmanti, 2005).

Pentingnya peranan modal manusia dalam pembangunan tampak pada perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang mengalokasi investasi maupun belanja daerahnya. Kepentingan modal manusia ini tidak serta merta dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu singkat. Sehingga tidaklah heran bahwa di dalam anggaran pemerintah sering kali terjadi tarik-menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan modal manusia (Sjafii, 2005).

Lanjut menurut Sjafii (2005), di satu sisi pengeluaran investasi infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya perbaikan modal manusia sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Sehingga peran pemerintah pada sektor publik sangat diperlukan untuk pembangunan manusia, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah lokal. Selama ini pengeluaran pembangunan pemerintah lokal masih terkonsentrasi pada bidang infrastruktur ekonomi dan belum memberikan perhatian yang memadai bagi bidang pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Brata (2005), mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia, memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan manusia. Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula kualitas mutu modal manusia dan semakin baik pula IPM yang dicapai.

Pendidikan dan Kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Lonjow dkk, 2001, dalam Paramitha, 2012). Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas mutu modal manusia.

Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) tahun 2004 dikatakan bahwa dalam jangka pendek, walaupun tidak ada pertumbuhan ekonomi yang memuaskan, sebuah negara dapat meningkatkan pembangunan manusia yang cukup signifikan melalui pengeluaran publik yang direalisasikan dengan baik. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan realisasi belanja pembangunan terutama disektor pendidikan dan kesehatan akan memberi pengaruh yang positif bagi perkembangan pembangunan manusia.

Menurut Irawan (2009), pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap perkembangan manusia Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin baik pula tingkat perkembangan manusia

atau *human capital* di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa semakin makmur masyarakat, maka akan semakin banyak kesempatan untuk berinvestasi pada peningkatan mutu modal manusia walaupun tidak semua tingkat pendapatan dibelanjakan pada investasi *human capital* (tidak signifikan). Walaupun demikian, pengaruh pendapatan per kapita terhadap perkembangan manusia tidak signifikan disebabkan pendapatan per kapita bukan merupakan indikator kemakuran yang baik karena tidak menggambarkan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembuktian empiris di Kabupaten Soppeng mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan serta pengaruh pendapatan per kapita terhadap peningkatan mutu modal manusia yang tercermin dalam indeks pendidikan, sehingga penulis memberi judul skripsi ini

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Modal Manusia di Kabupaten Soppeng”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, di rumuskan masalah penelian sebagai berikut.

1. Apakah pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng?
2. Apakah pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng?

3. Apakah pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng?
4. Apakah pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng?
5. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan mengena pada sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng.

5. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada para pengambil kebijakan, terutama kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta instansi terkait, dalam menentukan langkah-langkah kebijakan agar dapat meningkatkan investasi modal manusia.
2. Bagi masyarakat ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu ekonomi pembangunan khususnya pada peningkatan mutu modal manusia.
3. Sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi peningkatan investasi modal manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manusia sebagai Modal Pembangunan

Salah satu tujuan jangka panjang dari pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Meskipun kemajuan teknologi mempunyai peranan yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam pembuatan kebijakan pengembangan teknologi mesti mempertimbangkan, antara lain sumber daya yang dimiliki serta tujuan dari pembangunan itu sendiri (Maasyirah, 2011).

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi modal manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif (Jhingan, 2002).

Menurut Maasyirah (2011) dalam proses pertumbuhan ekonomi, lazimnya orang lebih menekankan arti penting akumulasi modal fisik. Sekarang makin disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia yaitu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan suatu negara. Kebutuhan investasi

pada pembentukan modal manusia di dalam perekonomian sangatlah penting, hal ini terlihat jelas bahwa walaupun impor modal fisik secara besar-besaran ternyata tidak mampu mempercepat laju pertumbuhan, karena sumber manusianya terbelakang.

Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total (Maasyirah, 2011).

Ada tiga faktor produksi dalam pembangunan ekonomi. Ketiga faktor tersebut menurut ekonomi klasik, yaitu; tanah, pekerja, dan modal. Menurutnya tanah terdapat dalam jumlah yang tetap, tidak tergantung pada tingkat harganya. Artinya harga dapat naik turun, tetapi jumlah tanah yang ditawarkan tidak berubah. Sementara itu, jumlah pekerja relatif elastis terhadap tingkat upah. Bila upah naik melebihi tingkat subsistem maka jumlah penduduk (dan karenanya jumlah tenaga kerja) akan meningkat dengan cepat (Muliadi, 2012: 194).

Seperti halnya dengan tanah, sejumlah tenaga kerja “bermutu” tidak akan dapat menghasilkan output yang banyak. Tersedianya jumlah tenaga kerja atau penduduk dalam jumlah yang besar dan mutu yang rendah akan menyebabkan tersedianya output per kapita yang rendah. Oleh karena itu diusahakan penggalakan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk. Dipihak lain diusahakan tenaga kerja yang jumlahnya relatif tidak besar itu adalah tenaga kerja yang mutunya tinggi. Jika tidak, mengecilnya jumlah tenaga kerja tidak otomatis memberikan output per kapita yang lebih tinggi.

Produktivitas merupakan suatu pengukuran output. Pengukuran ini merupakan relatif (*output terhadap input*) untuk membedakan terhadap pengukuran absolut (*output*), yaitu dengan produksi total. Jadi untuk menghitung produktivitas harus diketahui lebih dulu produksi total. Tanpa mengetahui produksi total tidak akan dapat menghitung produktivitas. Produktivitas pekerja pada suatu kemampuan maksimal seorang pekerja untuk menghasilkan output. Dalam kenyataannya, pekerja tersebut belum tentu memanfaatkan seluruh kemampuannya. Seberapa jauh dia memanfaatkan kemampuan diukur dengan angka efisiensi. Produktifitas semacam ini disebut produktifitas fisik.

Mutu tenaga kerja dikatakan meningkat bila dengan jumlah satuan pekerja yang sama dapat dicapai tingkat produktifitas yang lebih tinggi. Mutu tenaga kerja dapat meningkat karena tiga hal, yaitu: (a) sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang lebih besar dan atau mutu yang lebih tinggi, (b) sumber daya modal fisik tersedia dalam jumlah yang lebih banyak dan atau mutu yang lebih tinggi, dan (c) mutu manusia itu sendiri yang lebih tinggi.

Mutu modal manusia merupakan suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi. Pengorbanan (biaya) untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa memdatang. Oleh karena itu, disini digunakan istilah "modal". Sumber daya manusia yang sudah mengalami pengolahan lebih lanjut disebut modal manusia. Penggunaan istilah modal manusia juga menyiratkan suatu perhatian pada pengolahan sumber daya manusia, yang merupakan investasi.

Mutu modal manusia berbeda dengan produktivitas. Peningkatan mutu modal manusia dapat menaikkan produktivitas. Tetapi kenaikan produktivitas

belum tentu berasal dari kenaikan mutu modal manusia. Konsep mutu modal manusia juga mengacu pada kemampuan berproduksi.

Menurut Olgard (1968) dalam Muliadi (2012), terdapat tiga jenis perubahan mutu modal manusia, yaitu; (a) Efek tahunan, berarti semua pekerja mempunyai mutu modal manusia yang lebih tinggi dengan berjalannya waktu. Hal ini terjadi, misalnya karena peningkatan kesehatan yang diakibatkan adanya perbaikan lingkungan, (b) Efek kohor, pekerja yang lebih muda (kohor yang lebih muda) mempunyai mutu modal manusia yang lebih tinggi. Seperti halnya pendidikan yang lebih baik, dan (c) Efek usia, peningkatan usia dapat meningkatkan mutu modal manusia seseorang bila usianya relatif masih muda. Pada usia yang relatif tua, peningkatan usia tersebut dapat menurunkan mutu modal manusia.

Manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, dan *entrepreneur* untuk menghasilkan output. Semakin tinggi mutu sumber daya manusia dalam suatu negara maka semakin meninggi pula efisiensi dan produktifitas negara tersebut.

2.1.1.1 Modal Manusia (*Human Capital*)

Modal manusia adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga (Todaro, 2006).

Modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa (Mankiw, 2007).

Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan kesehatan. Disamping itu kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2006).

Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan, karena banyak program kesehatan bergantung pada keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah, termasuk kesehatan pribadi dan sanitasi, disamping melek huruf dan angka, juga dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan kesehatan (Sari, 2013).

Becker (1993) dalam Rustiono (2008), mengemukakan bahwa teori modal manusia telah menjadi pemikiran banyak pihak sejalan dengan berhasilnya umat manusia mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk, menanggapi kekhawatiran Malthus akan adanya bencana bagi umat manusia bila penduduk terus bertambah. Teori modal manusia pada dasarnya membahas proses merumuskan bentuk-bentuk investasi yang bisa ditanamkan kepada manusia, sebab manusia diakui sebagai salah satu sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Model Pertumbuhan Endogen, yang diawali oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) yang mengasumsikan tingkat pengembalian yang konstan atau meningkat terhadap modal. Teori Romer atau lebih dikenal dengan sebutan model pertumbuhan endogen muncul untuk melengkapi pertanyaan yang belum terjawab pada teori-teori sebelumnya bahwa dalam kondisi mapan, tingkat output tidak akan bertambah lagi meskipun input terus ditambah. Teori ini memiliki kemiripan struktural dengan model neoklasik, namun sangat berbeda dengan asumsi serta kesimpulan yang ditarik darinya. Perbedaan mendasar dari teori ini adalah adanya hasil marjinal yang semakin menurun pada investasi modal, memberikan peluang terjadinya skala hasil yang semakin meningkat (*increasing return to scale*) dalam produksi agregat. Dengan mengasumsikan bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang membalikkan kecenderungan hasil yang semakin menurun secara alamiah.

Teori Romer kemudian berupaya menjelaskan keberadaan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda antar Negara. Dan karena teknologi masih memainkan peranan penting dalam model ini, perubahan eksogen tidak diperlukan lagi untuk menjelaskan pertumbuhan jangka panjang. Teori ini juga menekankan terdapat dua hal penting dalam meningkatkan produktivitas modal, yaitu *learning by doing* dan *learning by investing* yang memasukkan faktor modal manusia sebagai faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada model pertama, pertumbuhan modal manusia bergantung pada bagaimana interaksi antara faktor produksi dan akumulasi modal manusia, sedangkan model kedua menekankan bahwa pertumbuhan modal manusia merupakan fungsi yang positif untuk produksi barang baru. Teori ini mengasumsikan bahwa dengan adanya peningkatan

modal manusia maka tingkat investasi akan terus berkembang karena kemajuan teknologi yang menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas modal hanya dapat digerakkan apabila terdapat sumber daya manusia yang berkualitas.

Lucas (1988) dalam Rustiono (2008), berargumen bahwa akumulasi modal manusia melalui investasi (misal meningkatkan waktu belajar) mendorong pertumbuhan endogen. Argumentasinya menekankan pada keuntungan yang disebabkan oleh eksternalitas dari modal manusia yang cenderung meningkatkan tingkat pengembalian modal manusia. Romer menyebutkan bahwa modal manusia merupakan input kunci pokok untuk sektor riset karena menyebabkan ditemukannya produk baru/ide yang disadari sebagai pendorong perkembangan teknologi. Dengan demikian, Negara-negara dengan stok awal modal manusia yang lebih tinggi, ekonominya tumbuh lebih cepat. Dengan demikian modal manusia disadari merupakan sumber pertumbuhan yang penting dalam teori pertumbuhan endogen.

2.1.1.2 Indeks Pendidikan

UNDP menetapkan perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf/*Adult Literacy Indeks* (Lit) dan rata-rata lama sekolah/*Mean Years Of Schooling Indeks* (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Penghitungan Indeks pendidikan dilakukan dengan rumus :

$$\mathbf{C2 = 2/3 Indeks Lit + 1/3 Indeks MYS}$$

Dimana:

C2 = Indeks Pendidikan

Lit = Angka Melek Huruf

MYS = Rata-rata Lama Sekolah

$$MYS = \frac{\sum f_i \times s_i}{\sum f_i}$$

Dimana:

MYS = Rata-Rata Lama Sekolah

F_i = Frekuensi penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan i ,

s_i = 1,2,...,11 ; s_i = Skor masing-masing jenjang pendidikan

Sebelum perhitungan di atas, dalam pengolahan data susenas, pada keterangan pendidikan diperlukan skor/konversi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang, sebagai berikut:

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Konversi (Tahun)	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Konversi (Tahun)
1. Tidak pernah sekolah	0	6. Diploma II	14
2. Sekolah Dasar	6	7. Akademi/Diploma III	15
3. SLTP	9	8. Diploma IV/Sarjana	16
4. SLTA/SMU	12	9. Magister (S2)	18
5. Diploma	13	10. Doktor (S3)	21

Pada dasarnya konsep pembangunan manusia adalah meletakkan manusia sebagai pusat pembangunan dengan upaya dilakukan perbaikan riil dalam hidup manusia di samping materi yang mengukur pendapatan atau kesejahteraan. Di bawah paradigma ini maka pertumbuhan ekonomi adalah perlu (*necessary*) tetapi bukan kondisi yang cukup (*sufficient*) untuk pembangunan manusia. Hampir dua dekade yang lalu *Human Development Report* memberikan pesan yang jelas bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran pembangunan yang penting namun terbatas dalam menangkap arti pendapatan ke dalam defenisi pembangunan manusia yang luas (UNDP, 2008).

Pembangunan manusia merupakan proses memperluas atau memperbanyak pilihan dan mempertinggi kemampuan manusia. Proses yang memperhatikan penciptaan lingkungan yang mendukung dimana manusia dapat mengembangkan potensi dan berperan produktif secara penuh serta hidup kreatif berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan. Konsep luas dengan banyak dimensi merupakan cara memperluas pilihan manusia. Di antara dimensi

kritis dan paling dasar adalah hidup sehat dan panjang, mempunyai akses ke ilmu pengetahuan, dan standar hidup layak. Tanpa dimensi dasar ini, maka dimensi yang lain seperti kebebasan politik, kemampuan untuk berpartisipasi dalam komunitas, penghargaan diri dan lain-lain tidak dapat dicapai (UNDP, 2008).

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performce*) suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercapai peningkatan pendapatan (UNDP, 1996). Namun konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia.

Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Badan Dunia yang menangani program-program pembangunan, yaitu *United Nation Development Program* (UNDP) telah menyusun indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) indikator. Ketiga indikator tersebut adalah; (1) Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age: eo*),

(2) Indikator Pendidikan, yaitu terdiri dari Angka Melek Huruf (*adult literacy rate: lit*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*means year schooling: MYS*), (3) *Purchasing Power Parity* (PPP) yang merupakan ukuran pendapatan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Pendidikan mempunyai tujuan yang lebih baik dari mempersiapkan seorang pekerja yang produktif. Pendekatan humanisme menuntut pendidikan sebagai suatu proses total untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Peran ganda pendidikan perlu ditekankan dan diterapkan. Peran tersebut adalah; (1) Pendidikan berfungsi untuk membina kemanusiaan (*human being*). Hal ini berarti bahwa pendidikan pada akhirnya dimaksud untuk mengembangkan seluruh pribadi manusia, termasuk mempersiapkan manusia sebagai anggota masyarakat, warga negara yang baik dan rasa persatuan (*cohesiveness*), (2) Pendidikan berfungsi sebagai *human resources* yaitu mengembangkan kemampuannya memasuki era kehidupan baru seperti kompetitif dan *employability* (H. A. R. Tilaar, 2000).

Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Menurut Boediarso Teguh Widodo (2004) dalam Maasyirah (2011) indikator kemajuan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan adalah; (a) Rata-rata lama sekolah penduduk (15 tahun keatas) mengalami kenaikan, (b) Proporsi penduduk (10 tahun ke atas) yang berpendidikan SLTP ke atas naik, (c) Angka melek aksara penduduk (usia 15 tahun ke atas) juga naik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, setidaknya terdapat dua tuntutan yang perlu dimiliki. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

memadai sebagai aset pembangunan. Kedua, penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kualitas SDM diantaranya dapat ditunjukkan dengan pencapaian angka melek huruf dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Karena pada dasarnya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengekspresikan kreativitas dan inovasi serta pengembangan wawasannya (Maasyirah, 2011).

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu modal manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pembangunan pendidikan dilakukan dengan upaya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang merata di tiap daerah. Peningkatan kualitas pendidikan terkait meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja (*link and mach*) dan lulusan mampu berdaya saing serta berakhlak mulia.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminka biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1994).

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak mamadai. Melainkan harus memperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkatkan pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1997).

Pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua macam; *Pertama*, pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 1994).

Menurut Putri (2009) anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti

perbaikan pendapatan aparaturnya pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, juga terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dari dalam dan luar negeri yaitu pada saat implikasi di saat pengembalian.

Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen atau lembaga negara non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap (Dumairy, 1997).

Kedua, pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu (Putri, 2011).

Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan

pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin (Nota Keuangan dan APBN, 2004).

Sehubungan dengan hal tersebut formulasi distribusi dan alokasi dari penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijaksanaan fiskal. Di samping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap di tempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan (Putri, 2011).

Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk program pinjaman. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk departemen Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Basri, 2005).

Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan

prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan pengairan. Di samping itu juga dilakukan pengadaan prasarana pendukung Hankam, Telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan (Basri, 2005).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan mutu modal manusia yang didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasar kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keteladanan.

2.1.3 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita, produk nasional bruto serta pendapatan per kepala memberikan petunjuk yang lebih umum mengenai standar hidup. Pendapatan, diukur dengan tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan kemampuan belanja dari suatu nilai mata uang, atau tingkat pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita.

Secara makro pendapatan perkapita yaitu pendapatan yang diperoleh dari rata-rata tiap penduduk selama satu tahun. Pendapatan ini dihitung dari pendapatan nasional (GNP) secara keseluruhan dibagi dengan jumlah penduduk (Deliarnov, 1995). Tinggi rendahnya pendapatan per kapita penduduk tergantung pada jumlah penduduk. Beberapa kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan pendapatan perkapita yaitu: (a) Jika GNP dari jumlah penduduk tetap naik maka pendapatan perkapita akan turun, (b) Jika GNP tetap, maka pendapatan per kapita akan berkurang, dan (c) Jika GNP bertambah, maka pendapatan per kapita akan berubah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk.

Todaro (2006) mengemukakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan pendapatan per kapita yang cepat maka perlu dilakukan pembangunan wilayah sehingga mampu menyediakan dan memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, memperkecil disparitas kemakmuran antara daerah atau regional serta mendorong transformasi perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian dan industri melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia tapi dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian (*sustainable*).

Dalam makroekonomi, pendapatan merupakan fungsi dari konsumsi ditambah dengan tabungan (*saving*), sehingga kenaikan pendapatan akan mendorong kenaikan konsumsi baik berupa barang maupun jasa serta mendorong kenaikan tabungan. Semakin membaik pembangunan ekonomi di suatu daerah semakin tinggi tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita yang berarti semakin baik standar hidup atau mutu modal manusia di daerah tersebut.

Dalam menghitung pendapatan per kapita ada dua macam perhitungan yang dapat dilakukan yaitu berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan. Perhitungan menurut harga berlaku penting untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk tersebut membeli barang. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat melalui alokasi pengeluaran konsumsi. Semakin sejahtera penduduk suatu negara, semakin kecil pengeluaran konsumsinya untuk pembelian bahan pangan dan lebih terkonsentrasi pada pembelian barang pangan (Sukirno, 1985).

2.1.4 Hubungan Variabel

2.1.4.1 Efek Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Mutu Modal Manusia (Indeks Pendidikan)

Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001).

Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Kondisi umum pendidikan di Indonesia ditandai oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM); sekitar 58 % dari tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau kurang, hanya 4 % yang berpendidikan tinggi. Prospek peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang pun terlihat suram. Rata-rata angka partisipasi pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi masih relative rendah yakni 56 % untuk SLTP, 32 % untuk SLTA dan 12 % untuk perguruan tinggi (Susenas, 2002).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 % anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain. Pelaksanaan APBN-P 2006, belanja pemerintah pusat untuk pendidikan hanya 9,3 %.

Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting dari pada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Putri, 2011).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

Menurut Mankiw (2008) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Strauss dan Thomas (1998), dalam *Journal of economic literature*, menemukan begitu besarnya dampak perbaikan kesehatan dan gizi terhadap produktivitas tenaga kerja serta harapan hidup. Secara implicit hasil riset terakhir memperkuat pendapat bahwa pengembalian investasi manusia dapat dihasilkan dari akumulasi investasi yang terkait dengan kesehatan, gizi, pendidikan dan training.

Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Selain itu, jaringan transportasi yang terintegrasi dengan baik akan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan secara jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembangunan.

2.1.4.2 Efek Pendapatan Per Kapita terhadap Mutu Modal Manusia (Indeks Pendidikan)

Mutu modal manusia banyak disoroti karena merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat suatu kawasan dapat menikmati lebih banyak barang dan jasa, pendapatan lebih tinggi, dan kemakmuran pun meningkat (Irawan, 2009).

Barro dan Lee (1996) dalam Irawan (2009), menemukan bahwa tingkat pendapatan perkapita adalah faktor paling penting dalam meningkatkan mutu modal manusia. Hal ini ditandai oleh cukup banyaknya koefisien dari kedua variabel tersebut dalam estimasi dan keduanya secara statistik signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2009) menyimpulkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap perkembangan manusia Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin baik pula tingkat perkembangan manusia atau *human capital* di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa semakin makmur masyarakat, maka akan semakin banyak kesempatan untuk berinvestasi pada peningkatan mutu modal manusia walaupun tidak semua tingkat pendapatan dibelanjakan pada investasi *human capital* (tidak signifikan). Walaupun demikian, pengaruh pendapatan per kapita terhadap perkembangan manusia tidak signifikan disebabkan pendapatan per kapita bukan merupakan indikator kemakmuran yang baik karena tidak menggambarkan pemerataan pendapatan.

Oleh karena itu, *human capital* dan *technological progress* merupakan alur peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hubungannya dengan pertumbuhan populasi, Black dan Henderson (1999) dalam Irawan menemukan bahwa peningkatan lulusan *high school* dan perguruan tinggi akan berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, peningkatan ratio jumlah orang

yang bekerja di sektor manufaktur dengan jumlah populasi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah populasi pula. Hal ini dimungkinkan, mengingat terjadinya *multiplier effect* pada penciptaan lapangan kerja baru dalam sebuah kota. Dengan peningkatan pendapatan akibat dari bekerja, para pekerja tentunya akan membelanjakan uang mereka pada *local goods*. Produsen yang menghadapi kenaikan pendapatan ini merespon dengan menyewa tenaga kerja baru, sehingga penyerapan tenaga kerja kembali terjadi. Inilah fenomena *multiplier effect* dalam penciptaan lapangan kerja baru.

Peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan akan mendorong kemampuan untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Sehingga peningkatan konsumsi akan berdampak pada peningkatan seseorang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik ataupun pemenuhan gizi dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

2.2 Kajian Empiris

Sebagai acuan dari penelitian ini, dikemukakan hasil-hasil yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2009) yang berjudul analisis pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, perbedaan pertumbuhan regional, dan perkembangan ukuran provinsi di Indonesia, serta faktor-faktor determinasinya, menyatakan bahwa pembahasan mengenai peran mutu modal manusia sudah banyak dibahas oleh para ekonom, Namun demikian, pembahasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mutu modal manusia belum banyak menjadi perhatian. Barro dan Lee (1996)

berhasil membangun model determinasi perkembangan manusia (*human development*) yang diasumsikan sama dengan mutu modal manusia (*human capital*). Barro dan Lee (1996) dalam Irawan menyatakan bahwa mutu modal manusia memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu lamanya masyarakat mengenyam pendidikan di sekolah, tingkat pendapatan, keterbukaan ekonomi suatu wilayah, pemerataan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Hasil estimasi model ini menyatakan bahwa tingkat keterbukaan ekonomi suatu kawasan dan tingkat pemerataan pendapatan menjadi komponen penting tingkat mutu modal manusia suatu wilayah. Faktor lamanya masyarakat bersekolah, tingkat pendapatan, dan pengeluaran pemerintah juga berpengaruh positif kepada tingkat mutu modal manusia, namun tidak terlalu (belum) signifikan. Pengeluaran pemerintah provinsi pada sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap perkembangan mutu modal manusia. Penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah provinsi pada sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu modal manusia atau perkembangan manusia Indonesia. Walaupun demikian, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perkembangan manusia tidak signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan belum secara efektif dan efisien mendukung perkembangan mutu modal manusia, bahkan bila disalahgunakan, misalnya dikorupsi atau tidak tepat sasaran, pengeluaran tersebut justru berpengaruh negatif pada perkembangan manusia Indonesia. Dan untuk pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap perkembangan manusia Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin baik pula tingkat perkembangan manusia atau *human capital* di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa semakin makmur masyarakat, maka akan semakin banyak kesempatan untuk berinvestasi pada

peningkatan mutu modal manusia walaupun tidak semua tingkat pendapatan dibelanjakan pada investasi *human capital* (tidak signifikan). Walaupun demikian, pengaruh pendapatan per kapita terhadap perkembangan manusia tidak signifikan disebabkan pendapatan per kapita bukan merupakan indikator kemakuran yang baik karena tidak menggambarkan pemerataan pendapatan.

Paramita (2012), melakukan penelitian mengenai dampak realisasi APBD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar periode 2000-2009. Hasilnya, variabel belanja modal dan biaya operasional pemeliharaan bidang pendidikan mempunyai pengaruh (positif) dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang di dalamnya terdapat indikator Indeks Pendidikan yang mencerminkan mutu modal manusia di Kota Makassar. Hal ini telah sesuai dengan teori dan berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa sektor pendidikan memang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah karena berperan penting dalam menunjang perolehan IPM.

Penelitian yang dilakukan Brata (2005) menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta dan distribusi pendapatan proksi indeks Gini terhadap indeks pembangunan manusia (*IPM*) dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula IPM yang dicapai. Variabel investasi swasta berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik investasi swasta tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Sedangkan variabel distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap IPM,

artinya semakin merata distribusi pendapatan semakin baik pula pembangunan manusia.

Usmaliadanti (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder. Penggunaan kemiskinan di 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Adjusted R²* cukup tinggi yaitu 0,983469. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembangunan Manusia, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Manusia.

2.3 Kerangka Pikir

Manusia merupakan sumber daya serta modal dasar dalam poses pembangunan. Mutu modal manusia dapat tercermin pada Indek Pendidikan yang dihitung berdasarkan dua komponen yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah, yang merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat pengetahuan manusia. Semakin meningkat indeks pendidikan manusia maka semakin tinggi pengetahuannya, dan semakin meningkat pula mutu modal manusia tersebut.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai sebagai aset pembangunan dan yang mampu menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Maka sangat diperlukan peran pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan. Karena pada dasarnya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dan merupakan salah satu upaya dalam membangun watak bangsa.

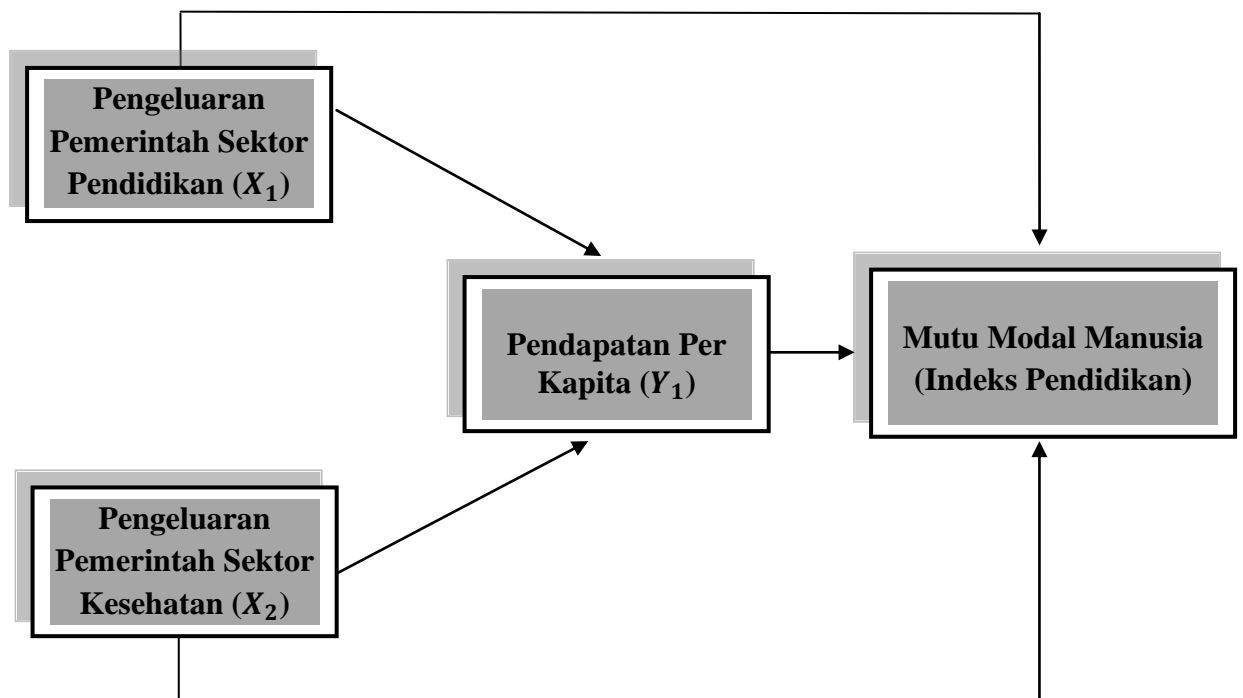
Saat ini Indonesia sedang berada pada tahap pembangunan dimana peningkatan mutu modal manusia sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Aspek-aspek peningkatan mutu modal manusia dapat dilakukan melalui pembangunan antara lain disektor pendidikan dan kesehatan. Pembangunan sektor-sektor tersebut dapat direalisasikan pemerintah melalui pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah dalam sektor tersebut pada jangka panjang akan meningkatkan indeks pendidikan secara langsung yang menjadi cerminan mutu modal manusia, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah faktor yang paling penting dalam meningkatkan mutu modal manusia, semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin baik pula tingkat perkembangan manusia dengan banyaknya kesempatan untuk berinvestasi pada peningkatan mutu modal manusia.

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang mempengaruhi mutu modal manusia (indeks pendidikan) di Kabupaten Soppeng adalah pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan faktor yang diyakini berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan indeks pendidikan yang mencerminkan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan pendapatan per kapita.

Dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka penulis menguraikan landasan berpikir dalam Gambar 2.1 yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada diarahkan untuk merujuk pada dugaan sementara yaitu:

1. Diduga pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng.
2. Diduga pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng.
3. Diduga pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng.
4. Diduga pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng.
5. Diduga pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan ekonometrika dengan metode kuantitatif menggunakan pemodelan regresi linear berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh variable-variabel independen terhadap variable dependen.

3.1 Lokasi Penelitian

Adapun daerah penelitian yang penulis pilih sebagai tempat penelitian adalah Kabupaten Soppeng yaitu kantor Badan Pusat Statistik dan instansi terkait yang dianggap mewakili ruang lingkup penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*Library Research*), sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2002 – 2012. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, skripsi serta dari *browsing website internet* yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, dengan menggunakan data *Time Series* yang merupakan data selama periode 11 tahun (2002-2012) yang bersifat data kuantitatif. Dalam hal ini sumber data yang digunakan yaitu data dari APBD, Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nation Development Programme (UNDP) berupa data angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, indeks pendidikan, pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, serta pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.

Selain itu digunakan juga studi kepustakaan, yaitu informasi yang diperoleh melalui beberapa literatur dan artikel yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan pokok penelitian.

3.4 Metode Analisis

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah masing-masing untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan dan pendapatan per kapita terhadap Mutu Modal Manusia di Kabupaten Soppeng, digunakan metode regresi berganda.

Metode regresi berganda adalah metode regresi yang melibatkan satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan pengolahan data-data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode Ordinary Least Square (metode kuadrat kecil). Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi

permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat (Wagiono,1994).

Guna meneliti keterkaitan atau hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti, maka sifat dari penelitian ini adalah verifikatif dan selanjutnya akan dilakukan pengujian secara statistik dan ekonometrik agar diperoleh suatu kesimpulan.

Hubungan antar Variabel dapat diperlihatkan melalui model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3,) \dots \dots \dots (3.1)$$

Dengan menurunkan persamaan fungsi dari Mutu Modal Manusia/Indeks Pendidikan (Y_2) yang ditransformasi kedalam persamaan linier dengan memasukkan unsur Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan (X_1), Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan (X_2), dan Pendapatan per Kapita (Y_1). Sehingga model dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$e^Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} e^{\mu} \dots \dots \dots (3.2)$$

$$Y_1 = f (X_1, X_2) \dots \dots \dots (3.3)$$

$$Y_1 = \alpha_0 X_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} e^{\mu_1} \dots \dots \dots (3.3.1)$$

$$\ln Y_1 = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \mu_1 \dots \dots \dots (3.3.1.1)$$

$$Y_2 = f (X_1, X_2, Y_1) \dots \dots \dots (3.4)$$

$$Y_2 = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} Y_1^{\beta_3} e^{\mu_2} \dots \dots \dots (3.4.1)$$

$$Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln Y_1 + \mu_2 \dots \dots \dots (3.4.1.1)$$

dimana :

Y_1 = Pendapatan per kapita satuan rupiah,

Y_2 = Mutu Modal Manusia (Indeks Pendidikan) dalam satuan %,

β_0 = Konstanta,

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi,

X_1 = Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam satuan milyar rupiah,

X_2 = Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam satuan milyar rupiah,

μ = *Error term*.

3.5 Pengujian Kriteria Statistik

Gujarati (2003) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien determinasi *Goodness of fit test* (R^2).

3.5.1 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel

dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F Tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$$

H1: minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2003).

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (N - K)} \dots\dots\dots(3.5)$$

dimana:

K = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = Jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. H₀ diterima dan H₁ ditolak apabila F hitung < F Tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H₀ ditolak dan H₁ diterima apabila F hitung > F Tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.5.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

1. $H_0 : \beta_2 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dengan Indeks Pendidikan (Mutu Modal Manusia). $H_1 : \beta_2 < 0$ ada pengaruh negatif antara variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dengan Indeks Pendidikan (Mutu Modal Manusia).
2. $H_0 : \beta_3 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan dengan Indeks Pendidikan (Mutu Modal Manusia). $H_1 : \beta_3 < 0$ ada pengaruh negatif antara variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan dengan Indeks Pendidikan (Mutu Modal Manusia).
3. $H_0 : \beta_4 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel Pendapatan per Kapita dengan Indeks Pendidikan (Mutu Modal Manusia). $H_1 : \beta_2 > 0$ ada pengaruh positif antara variabel Pendapatan per Kapita dengan Indeks Pendidikan (Mutu Modal Manusia).

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{\beta_i - \beta_i^*}{SE(\beta_i)} \dots \dots \dots (3.6)$$

dimana:

β_i = parameter yang diestimasi

β_i^* = nilai β_i pada hipotesis

$SE(\beta_i)$ = standar error β_i

Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika t-hitung $>$ t-Tabel maka H_0 ditolak, artinya salah satu variable independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

- b. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-Tabel}$ maka H_0 diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Imam Ghozali (2005) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) adalah intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* (R^2) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan formula:

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_1 - \bar{Y})^2}{\sum(Y_1 - \bar{Y})^2} \dots\dots\dots(3.7)$$

dimana:

y^* = nilai y estimasi

y = nilai y aktual

3.6 Definisi Operasional

- Mutu modal manusia yang diukur dari indeks pendidikan adalah penggabungan dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, yang merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat pengetahuan manusia, dalam satuan %.
- Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah dari APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan/di sektor pendidikan dalam satuan milyar rupiah.
- Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah dari APBD untuk membiayai penyelenggaraan kesehatan/di sektor kesehatan dalam satuan milyar rupiah.
- Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara atau wilayah dengan jumlah penduduk negara atau wilayah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita dalam satuan rupiah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Variabel Penelitian

4.1.1 Perkembangan Indeks Pendidikan (Mutu Modal Manusia) di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut dapat tercapai agar setiap orang dapat memperoleh peluang yang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang, untuk berpendidikan dan berkecakupan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup.

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia. Kualitas modal manusia dapat dicerminkan oleh pendidikan, kesehatan, dan ataupun indikator lainnya. Peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah, sehingga dapat meningkatkan kemajuan suatu daerah.

Secara teoritis pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM ini dapat berperan sebagai faktor produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Untuk mencapai SDM yang berkualitas dibutuhkan pembentukan modal manusia (*human capital*). Pembentukan modal manusia ini merupakan suatu proses untuk memperoleh sejumlah manusia yang memiliki karakter kuat yang dapat digunakan sebagai

modal penitng dalam pembangunan. Karakter ini dapat berupa tingkat keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat.

Pentingnya modal manusia dalam pembangunan telah dimulai pada tahun 1960-an oleh pemikirannya Theodore Schultz tentang *investment in human capital*. Menurutny pendidikan merupakan suatu bentuk investasi dalam pembangunan dan bukan merupakan suatu bentuk investasi. Dalam perkembangannya, Schultz memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai melalui terjadinya peningkatan keahlian/keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Untuk melihat perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2006-2012, dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 4.1 Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012

Tahun	Angka melek huruf (%)	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Indeks pendidikan (%)
2003	82,61	6,20	67,92
2004	82,30	6,30	68,87
2005	83,10	6,50	69,84
2006	83,60	6,50	70,25
2007	84,60	6,90	71,62
2008	84,60	6,80	71,60
2009	85,10	7,00	72,24
2010	86,67	7,30	73,90
2011	86,71	7,28	73,99
2012	86,99	7,29	74,18

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (Indeks Pembangunan Manusia, data diolah)

Secara keseluruhan pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng selama periode 2003-2012 pada Tabel 4.1 menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini berhubungan langsung dengan perbaikan indikator sosial,

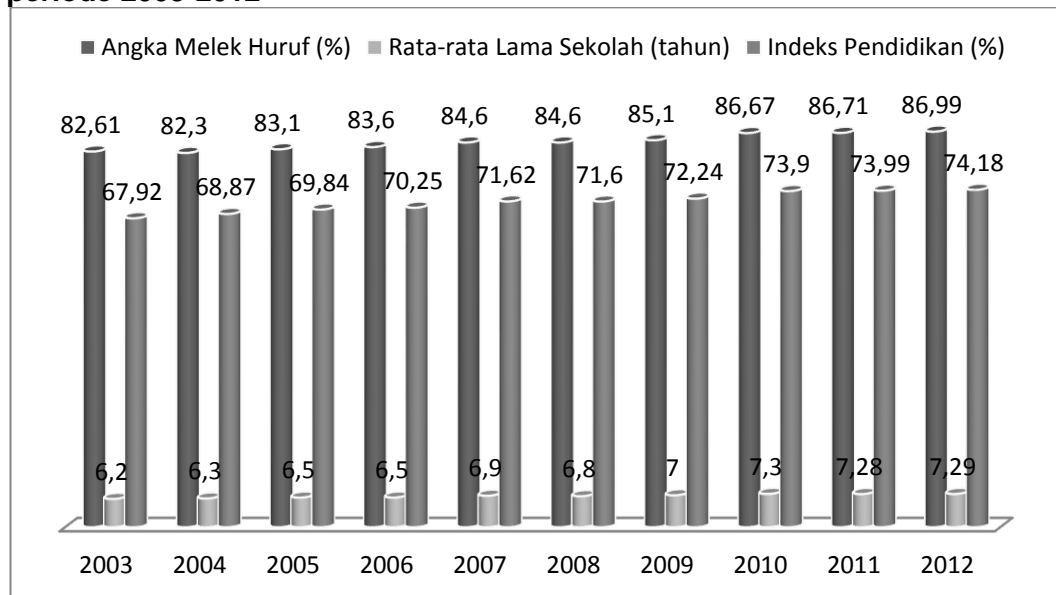
yakni angka melek huruf dewasa terus meningkat seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah.

Selama kurun waktu 2003-2012 indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng relative mengalami peningkatan yang cukup membaik. Hal ini terlihat pada Tabel 4.1 dari tahun 2006 indeks pendidikan mencapai 70,2%, dengan angka melek huruf 83,60% dan rata-rata lama sekolah mencapai 6,5 pertahun. Begitupun dengan tahun berikutnya indeks pendidikan meningkat menjadi 71,6% pada tahun 2007, yang sebelumnya 70,2%. Hal ini terwujud dari angka melek huruf naik menjadi 84,6% dan rata-rata lama sekolah juga naik menjadi 6,9 pertahun. Kemudian pada tahun 2008, indeks pendidikan tetap berada pada angka 71,6%, hal ini dikarenakan angka rata-rata lama sekolah sedikit menurun menjadi 6,8 pertahun, dengan angka melek huruf yang tetap di angka 84,6%.

Pada tahun berikutnya indeks pendidikan mengalami peningkatan menjadi 72,24%, pada tahun 2009. Hal ini terwujud dengan adanya perbaikan indikator pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 7,0 pertahun, yang diikuti meningkatnya angka melek huruf di angka 85,1%. Seiring dengan itu kenaikan pun terjadi pada tahun 2010 yakni 73,9% dengan angka melek huruf 86,67% dan rata-rata lama sekolah 7,3 pertahun. Hal ini menjadi lebih baik lagi di tahun 2011 dengan indeks pendidikan mencapai 73,99%, yang menunjukkan peningkatan pada angka melek huruf 86,71% dan rata lama sekolah menjadi 7,28 pertahun. Adapun di tahun 2012 indeks pendidikan yakni 74,18%, dengan indikator angka melek huruf 86,99% dan rata-rata lama sekolah 7,29 pertahun.

Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (indeks Pembangunan Manusia, data diolah)

Dari hal tersebut, maka pendidikan untuk setiap manusia itu sangatlah penting. Olehnya itu pendidikan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan manusia itu sendiri. Untuk mengukur indeks pendidikan menggunakan dua indikator yakni angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dengan terwujudnya pembangunan manusia melalui pendidikan, sebagai penentu kinerja pembangunan yang lebih baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Kabupaten Soppeng periode 2002-2012

Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam realisasi APBD memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu fungsi alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap

tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta.

Pendanaan terhadap pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan berapa besar jumlah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan melalui APBD, untuk menyediakan fasilitas umum yang diperlukan semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk bidang pendidikan dan kesehatan yang ada. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu modal manusia pada suatu negara atau wilayah.

Table 4.2 Realisasi APBD untuk Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Kabupaten Soppeng, tahun 2002-2012

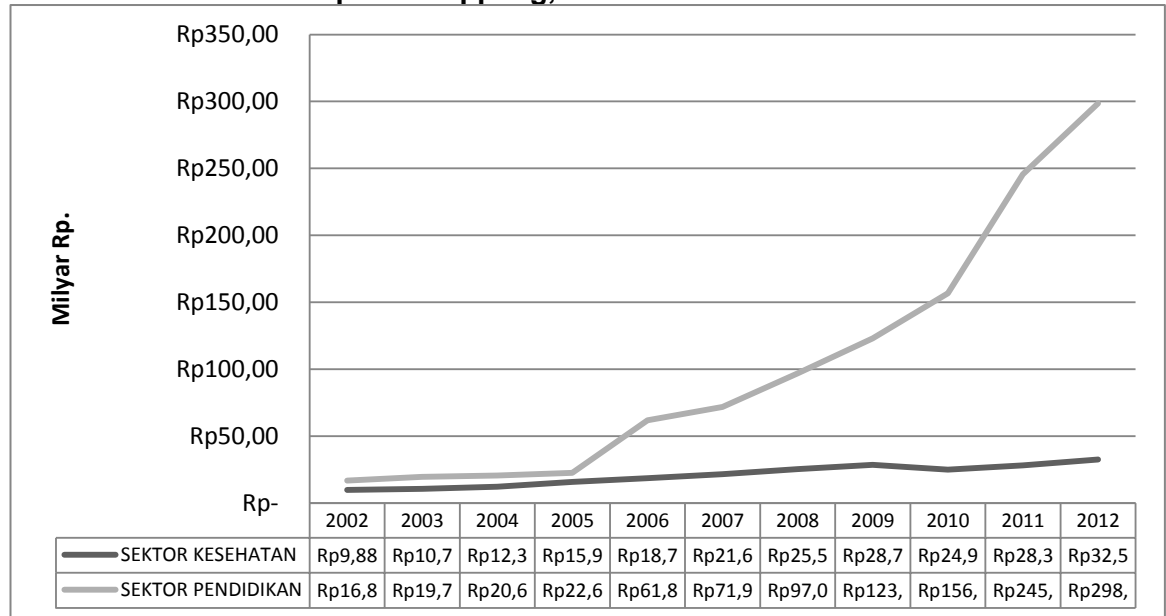
Tahun	Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan (X_1)	Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan (X_2)
2002	Rp. 16.874.387.222	Rp. 9.876.998.324
2003	Rp. 19.765.347.987	Rp. 10.785.586.823
2004	Rp. 20.675.239.365	Rp. 12.354.786.242
2005	Rp. 22.678.485.176	Rp. 15.897.567.200
2006	Rp. 61.839.235.267	Rp. 18.787.556.155
2007	Rp. 71.959.497.190	Rp. 21.649.407.128
2008	Rp. 96.996.295.530	Rp. 25.516.192.592
2009	Rp. 123.075.040.434	Rp. 28.748.437.564
2010	Rp. 156.684.618.182	Rp. 24.979.268.611
2011	Rp. 245.546.703.006	Rp. 28.318.514.070
2012	Rp. 298.648.013.901	Rp. 32.586.248.266

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Dari data yang diperoleh (Tabel 4.2) terlihat bahwa realisasi APBD untuk sektor pendidikan pemerintah Kabupaten Soppeng setiap tahunnya

relatif terus meningkat. Namun, anggaran untuk sektor kesehatan relative konstan.

Gambar 4.2 Perkembangan Realisasi APBD untuk Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Kabupaten Soppeng, tahun 2002-2012



Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Untuk sektor pendidikan jika dilihat dari Gambar 4.2 di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan. Sejak tahun 2002 hingga 2012 realisasi APBD untuk sektor pendidikan relatif meningkat. Peningkatan tajam mulai terjadi di tahun 2006, hal ini terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah serta keputusan mahkama konstitusi yang mengeluarkan kebijakan mengenai anggaran pendidikan 20% dari APBN seperti yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan.

Sehingga pengeluaran bidang pendidikan terus menerus meningkat tajam hingga sekarang. Tak hanya bidang pendidikan, peningkatan anggaran bidang kesehatan juga merupakan salah satu bagian penting dalam upaya

meningkatkan mutu modal manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan hak dasar penduduk dan salah satu kewajiban pemerintah.

Sejak tahun 2002 hingga 2012 pada Tabel 4.2 realisasi APBD untuk sektor kesehatan relatif konstan. Di tahun 2010, anggaran bidang kesehatan sempat mengalami penurunan dari Rp. 28.748.437.564 di tahun 2009, turun menjadi Rp. 24.979.268.611 di tahun 2010. Tetapi kemudian terus meningkat lagi hingga mencapai Rp. 32.586.248.266 di tahun 2012. Peningkatan realisasi anggaran ini juga sejalan dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Soppeng.

4.1.3 Perkembangan Pendapatan per Kapita di Kabupaten Soppeng periode 2002-2012

Peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan akan mendorong kemampuan untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Sehingga peningkatan konsumsi akan berdampak pada peningkatan seseorang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik ataupun pemenuhan gizi dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Untuk melihat perkembangan pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng periode 2002-2012, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

**Table 4.3 Pendapatan per Kapita Kabupaten Soppeng,
tahun 2002-2012**

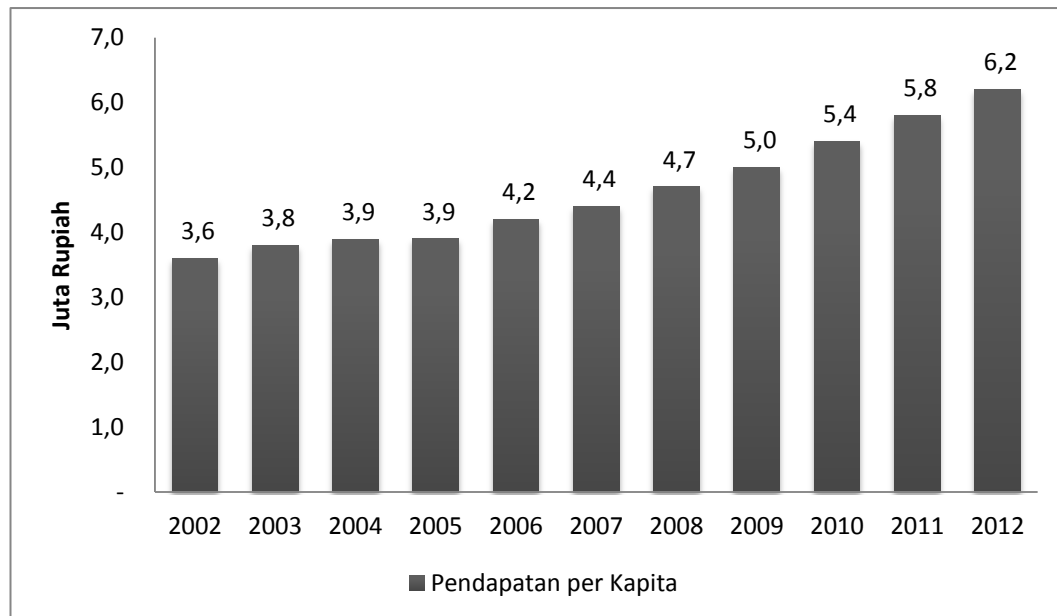
TAHUN	PENDAPATAN PER KAPITA (Y_1)
2002	Rp. 3.617.929
2003	Rp. 3.758.525
2004	Rp. 3.875.830
2005	Rp. 3.897.429
2006	Rp. 4.195.865
2007	Rp. 4.403.754
2008	Rp. 4.718.068
2009	Rp. 5.012.040
2010	Rp. 5.396.980
2011	Rp. 5.768.119
2012	Rp. 6.196.182

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Dari Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2002-2012 pendapatan per kapita Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tahun 2002 pendapatan per kapita Kabupaten Soppeng sebesar Rp. 3.617.929 meningkat menjadi Rp. 6.196.182 di tahun 2012. Untuk lebih jelasnya tentang

perkembangan pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Perkembangan Pendapatan per Kapita Kabupaten Soppeng, tahun 2002-2012



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2009) menyimpulkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap perkembangan manusia Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin baik pula tingkat perkembangan manusia atau *human capital* di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa semakin makmur masyarakat, maka akan semakin banyak kesempatan untuk berinvestasi pada peningkatan mutu modal manusia walaupun tidak semua tingkat pendapatan dibelanjakan pada investasi *human capital* (tidak signifikan). Walaupun demikian, pengaruh pendapatan per kapita terhadap perkembangan manusia tidak signifikan disebabkan pendapatan per kapita bukan merupakan indikator kemakuran yang baik karena tidak menggambarkan pemerataan pendapatan.

4.2 Analisis Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan ekonometrika dengan metode kuantitatif menggunakan pemodelan regresi linear berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh variable-variabel independen terhadap variable dependen. Dengan menggunakan data time series selama periode tahun 2006-2012 dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program EViews 7.0 yang membantu dalam pengujian model, mencari nilai koefisien dari tiap-tiap variabel, serta pengujian hipotesis secara parsial maupun bersama-sama.

4.2.1 Hasil Uji Statistik

4.2.1.1 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dari hasil regresi pada Tabel 4.6 (halaman 60) pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) terhadap pendapatan perkapita (Y_1) diperoleh dengan nilai sebesar R^2 0.957466.

Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas) yaitu, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) menjelaskan variasi pendapatan per kapita (Y_1) di Kabupaten Soppeng sebesar 95,7%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 4,3%.

Dari hasil regresi pada Tabel 4.7 (halaman 64) untuk pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), pendapatan per kapita (Y_1) terhadap indeks pendidikan (Y_2) diperoleh dengan nilai sebesar R^2 0.971391.

Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas) yaitu, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), pendapatan per kapita (Y_1), menjelaskan variasi indeks pendidikan (Y_2) di Kabupaten Soppeng sebesar 97,1%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 2,9%.

4.2.1.2 Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F)

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 diterima (F-statistik < F-tabel) artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
2. H_a diterima (F-statistik > F-tabel) artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1) dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) terhadap pendapatan per kapita (Y_1) di Kabupaten Soppeng dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha=0,05$) *degree of freedom* ($df1 = k-1 = 3-1 = 2$) dan *degree of freedom* ($df2 = n-k = 10-3 = 7$) diperoleh F-Tabel sebesar 4.74.

Dari hasil regresi pada Tabel 4.6 (halaman 60) diperoleh F-statistik sebesar 78.78710 maka F-statistik > F-tabel ($78.78710 > 4.74$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), pendapatan per kapita (Y_1), terhadap indeks pendidikan (Y_2) di Kabupaten Soppeng dengan menggunakan taraf keyakinan 95 % ($\alpha=0,05$) *degree of freedom* ($df1 = k-1 = 4-1 = 3$) dan *degree of freedom* ($df2 = n-k = 10-4 = 6$) diperoleh F-tabel sebesar 4.76. Dari hasil regresi pada Tabel 4.7 diperoleh F-statistik sebesar 67.90848 maka F-statistik > F-tabel ($67.90848 > 4.76$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.2.1.3 Pengujian Signifikansi secara Parsial (Uji t)

Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t-statistik lebih > nilai t-tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari nilai alpha (α) 1%, 5%, atau 10%.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) terhadap pendapatan per kapita (Y_1) di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) dan *degree of freedom* ($df = n-k = 10-3 = 7$), maka diperoleh t-tabel sebesar 1.895.

Tabel 4.4
Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$)
untuk Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y_1

Analisis	t-statistik	t-Tabel	Kesimpulan
X_1	4.507512	1.895	Signifikan
X_2	-0.526834	1.895	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 7.0

Dari Tabel 4.15 di atas, dapat diinterpretasikan bahwa secara individu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1) signifikan mempengaruhi pendapatan per kapita (Y_1) sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ atau taraf keyakinan 95%.

Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Soppeng untuk sektor kesehatan, dari data tahun 2003-2012 terlihat peningkatan realisasi dari tahun ketahun masih relatif rendah, berbeda halnya dengan pengeluaran sektor pendidikan yang peningkatannya cukup tajam.

Untuk pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), pendapatan per kapita (Y_1) di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) dan *degree of freedom* ($df = n-k = 10-4 = 6$), maka diperoleh nilai t-Tabel sebesar 1.943.

Tabel 4.5
Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$)
untuk Pengaruh X_1 , X_2 , dan Y_1 terhadap Y_2

Analisis	t-statistik	t-Tabel	Kesimpulan
X_1	-0.369207	1.943	Tidak Signifikan
X_2	2.662318	1.943	Signifikan
Y_1	1.730279	1.943	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 7.0

Dari Tabel 4.17 di atas, dapat diinterpretasikan bahwa secara individu pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1) dan pendapatan per kapita (Y_1) tidak signifikan mempengaruhi indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) signifikan mempengaruhi indeks pendidikan pada $\alpha = 5\%$ atau pada taraf keyakinan 95%.

4.2.2 Interpretasi Model

4.2.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) terhadap Pendapatan per Kapita (Y_1)

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012 dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independent tersebut mempengaruhi pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng, maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan program EViews 7.0 pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Hasil Perhitungan Statistik untuk Y_1

Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 12/19/13 Time: 05:42
Sample: 2003 2012
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.02440	1.392753	8.633552	0.0001
X1	0.181249	0.040211	4.507512	0.0028
X2	-0.051247	0.097273	-0.526834	0.6146
R-squared	0.957466	Mean dependent var		15.29981
Adjusted R-squared	0.945313	S.D. dependent var		0.160887
S.E. of regression	0.037624	Akaike info criterion		-3.479040
Sum squared resid	0.009909	Schwarz criterion		-3.388265
Log likelihood	20.39520	Hannan-Quinn criter.		-3.578621
F-statistic	78.78710	Durbin-Watson stat		1.357236
Prob(F-statistic)	0.000016			

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 (Lampiran 3)

Hasil persamaan regresi antara pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), terhadap pendapatan per kapita (Y_1) di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012 adalah:

$$\ln Y_1 = 12.02440 + 0.181249 X_1 - 0.051247 X_2 + \mu_1 \dots \dots \dots (3.3.1.1)$$

Dari hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk melihat pengaruh variabel independent yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), terhadap pendapatan per kapita (Y_1) di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012 adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Dari hasil regresi pada Tabel 4.6 (halaman 60) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng, hal ini terlihat pada probabilitasnya yaitu sebesar 0.0028 dan nilai koefisien X_1 sebesar 0.181249.

Menurut Mankiw (2007), modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.

Jadi dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan maka akan memperbesar kesempatan masyarakat untuk

mengenyam pendidikan, sehingga akan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan yang akan menjadi modal bagi para pekerja untuk meningkatkan produksinya dan diikuti oleh peningkatan pendapatan.

Artinya, setiap terjadi kenaikan sebesar 1% pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan maka akan mengakibatkan peningkatan pendapatan per kapita sebesar 0.181249%. Sebaliknya apabila pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan turun sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan indeks pendidikan sebesar 0.181249%.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Dari hasil regresi pada tabel 4.6 (halaman 60) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh secara statistik terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng, dengan demikian hipotesis tidak terbukti.

Ketidak signifikanan ini disebabkan karena masih rendahnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Soppeng untuk sektor kesehatan, dari pengamatan data tahun 2003-2012 terlihat peningkatan realisasi dari tahun ketahun masih relatif rendah, berbeda halnya dengan pengeluaran sektor pendidikan yang peningkatannya cukup tajam. Sehingga, pemerintah Kabupaten Soppeng harusnya juga lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang nantinya dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan perkapita.

Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan

yang lebih tinggi (Lonjow dkk, 2001, dalam Paramitha, 2012). Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas mutu modal manusia.

**4.2.2.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1),
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2),
Pendapatan per Kapita (Y_1) terhadap Indeks Pendidikan (Y_2)**

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pendapatan per kapita terhadap indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012 dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independent tersebut mempengaruhi indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng, maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan program EViews 7.0 pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Statistik untuk Y_2

Dependent Variable: Y2
Method: Least Squares
Date: 12/19/13 Time: 05:55
Sample: 2003 2012
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.620695	0.810870	1.998710	0.0926
X1	-0.005003	0.013551	-0.369207	0.7247
X2	0.045045	0.016919	2.662318	0.0374
Y1	0.111561	0.064476	1.730279	0.1343
R-squared	0.971391	Mean dependent var		4.268343
Adjusted R-squared	0.957087	S.D. dependent var		0.030982
S.E. of regression	0.006418	Akaike info criterion		-6.970211
Sum squared resid	0.000247	Schwarz criterion		-6.849177
Log likelihood	38.85106	Hannan-Quinn criter.		-7.102985
F-statistic	67.90848	Durbin-Watson stat		2.170805
Prob(F-statistic)	0.000051			

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 (Lampiran 4)

Hasil persamaan regresi antara pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), dan pendapatan per kapita (Y_1) terhadap indeks pendidikan (Y_2) di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012 adalah:

$$Y_2 = 1.620695 - 0.005003 + 0.045045 + 0.111561 + \mu_2 \dots \dots \dots (3.4.1.1)$$

Dari hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk melihat pengaruh variabel independent yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah sektor

pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), dan pendapatan per kapita (Y_1) terhadap indeks pendidikan (Y_2) di Kabupaten Soppeng periode 2003-2012 adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Berasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.7 (halaman 64), dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tidak signifikan dalam menjelaskan dan mempengaruhi variasi perubahan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng, dengan demikian hipotesis tidak terbukti.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan di Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun terlihat peningkatannya cukup tajam. Namun, hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tahun 2003-2012 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan mutu modal manusia Kabupaten Soppeng. Sehingga peningkatan yang cukup tajam pada realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan belum secara efektif dan efisien mempengaruhi peningkatan mutu modal manusia Kabupaten Soppeng. Kemungkinan besar penyebabnya adalah adanya kebocoran anggaran, misalkan penyalahgunaan yang tidak tepat sasaran.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan mutu modal manusia. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2009) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap perkembangan manusia. Penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap

peningkatan mutu modal manusia atau perkembangan wawasan manusia Indonesia. Walaupun demikian, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perkembangan manusia tidak signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan belum secara efektif dan efisien mendukung perkembangan mutu modal manusia, bahkan bila disalah gunakan, misalnya dikorupsi atau tidak tepat sasaran, pengeluaran tersebut justru berpengaruh negatif pada perkembangan manusia di Indonesia.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2006: 434).

Dari hasil regresi pada Tabel 4.7 (halaman 64) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng, hal ini terlihat pada probabilitasnya yaitu sebesar 0.0374 dan nilai koefisien X_2 sebesar 0.045045, dengan demikian hipotesis terbukti.

Artinya, setiap terjadi kenaikan sebesar 1% pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan maka akan mengakibatkan peningkatan indeks pendidikan sebesar 0.045045%. Sebaliknya apabila pengeluaran pemerintah pada sektor

kesehatan turun sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan indeks pendidikan sebesar 0.045045.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktifitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya (Putri, 2011).

Kabupaten Soppeng merupakan Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang sedang mengalami perkembangan. Sehingga pemerintah dituntut untuk harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk terus meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan. Namun, besaran peningkatan anggaran dari tahun ke tahun harus efektif dan efisien, serta tepat pada sasaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Brata (2005) menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah

khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta dan distribusi pendapatan proksi indeks gini terhadap indeks pembangunan manusia dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

c. Pendapatan per Kapita

Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Lonjow dkk, 2001, dalam Paramitha, 2012). Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas mutu modal manusia. Sehingga, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, karena pendapatan per kapita menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng.

Dari hasil regresi pada tabel 4.7 (halaman 64) menunjukkan bahwa pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng dengan nilai koefisien sebesar 0.111561 yang artinya jika pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Soppeng meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada indeks pendidikan. Namun variabel ini memiliki nilai probabilitas 0.1343 dimana nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), yang berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Hasil serupa terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2009) yang berjudul analisis pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi,

perbedaan pertumbuhan regional, dan perkembangan ukuran provinsi di Indonesia, serta faktor-faktor determinasinya. Dari hasil regresi didapatkan bahwa untuk pendapatan per kapita berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap peningkatan mutu modal manusia di Indonesia.

Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin baik pula tingkat perkembangan manusia (*human capital*) atau indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng. Hal ini membuktikan bahwa semakin makmur masyarakat, maka akan semakin banyak kesempatan untuk berinvestasi pada peningkatan mutu modal manusia (pendidikan dan kesehatan) walaupun tidak semua tingkat pendapatan dibelanjakan pada investasi *human capital* (tidak signifikan). Walaupun demikian, pengaruh pendapatan per kapita terhadap perkembangan manusia tidak signifikan disebabkan pendapatan per kapita bukan merupakan indikator kemakuran yang baik karena tidak menggambarkan pemerataan pendapatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1) berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap Pendapatan Perkapita (Y_1) di Kabupaten Soppeng. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan maka akan memperbesar kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan, sehingga akan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan yang akan menjadi modal bagi para pekerja untuk meningkatkan produksinya dan diikuti oleh peningkatan pendapatan.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) tidak signifikan dalam menjelaskan dan mempengaruhi perubahan pendapatan per kapita (Y_1) di Kabupaten Soppeng. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Soppeng untuk sektor kesehatan, dari data tahun 2003-2012 terlihat peningkatan realisasi dari tahun ketahun masih relatif rendah, berbeda halnya dengan pengeluaran sektor pendidikan yang peningkatannya cukup tajam.

3. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pendidikan (Y_2) di Kabupaten Soppeng, dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dari tahun ke tahun terlihat peningkatannya cukup tajam namun belum efektif dan efisien mempengaruhi peningkatan mutu modal manusia Kabupaten Soppeng. Kemungkinan besar penyebabnya adalah adanya kebocoran anggaran, misalkan penyalahgunaan yang tidak tepat sasaran.
4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap Indeks Pendidikan (Y_2) di Kabupaten Soppeng, dengan demikian hipotesis terbukti. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktifitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya (Putri, 2011).
5. Variabel Pendapatan per Kapita (Y_1) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pendidikan (Y_2) di Kabupaten Soppeng, dengan demikian hipotesis terbukti. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Lonjow dkk, 2001, dalam Paramitha, 2012). Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas mutu modal manusia.

6. Untuk pengaruh tidak langsung (*indirect*) variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1) dan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) melalui variabel antara yaitu Pendapatan per Kapita (Y_1) lebih mampu mempengaruhi peningkatan mutu modal manusia, karena dengan meningkatnya Pendapatan per Kapita maka akan membuka peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menginvestasikan pendapatannya pada peningkatan mutu modal manusia, khususnya pendidikan dan kesehatan. Dibanding dengan pengaruh langsung (*direct*) variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1) dan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) kurang efektif dan efisien mempengaruhi peningkatan mutu modal manusia di Kabupaten Soppeng.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Mutu Modal Manusia (Indeks Pendidikan) di Kabupaten Soppeng, pemerintah daerah harus lebih fokus memperhatikan penentuan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan anggaran yang efektif dan efisien agar tidak terjadi penyalahgunaan yang tidak tepat sasaran.
2. Mengingat Pendapatan per Kapita jg berpengaruh positif dalam meningkatkan Mutu Modal Manusia (Indeks Pendidikan) di Kabupaten Soppeng dimana Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan juga memiliki peranan penting dalam peningkatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin baik pula tingkat perkembangan manusia (*human capital*) atau indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng. Hal ini membuktikan bahwa semakin makmur masyarakat, maka akan semakin banyak kesempatan untuk berinvestasi pada peningkatan mutu modal manusia (pendidikan dan kesehatan) walaupun tidak semua tingkat pendapatan dibelanjakan pada investasi *human capital* (tidak signifikan). Walaupun demikian, pengaruh pendapatan per kapita terhadap perkembangan manusia tidak signifikan disebabkan pendapatan per kapita bukan merupakan indikator kemakuran yang baik karena tidak menggambarkan pemerataan pendapatan.

3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bisa mendekati fenomena sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*, edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Atmanti, Hastarini Dwi, 2005. *Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan*, Jurnal Dinamika Pembangunan.
- Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, 2012. *Analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan 2011*. Makassar, Areso Makassar.
- Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta, Rajawali Press.
- Bastias, Desi Dwi, 2010. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Skripsi.
- Badan Pusat Statistik, 2002. *Survei Sosial – Ekonomi Nasional (Susenas, 2002)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010*, BPS Sulawesi Selatan, Makassar, Areso Makassar.
- _____ (2007). *Indikator Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2006*, BPS Sulawesi Selatan, Makassar, Areso Makassar.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Erlangga.
- Gujarati, Damodar, 2003. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. McGraw-Hill Companies, New York.
- H. A. R. Tilaar. 2000. *Pendidikan abad ke-21 Menunjang Knowledge-Based Economy*. Analisis CSIS. Tahun XXIX/2000, No. 3, Jakarta, Hlm: 257-285.
- Imam Ghozali, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Undip: Semarang.
- Irawan, Yoga, 2009. *Analisi Pengaruh Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Perbedaan Pertumbuhan Regional, dan Perkembangan Ukuran Provinsi di Indonesia, Serta Faktor-Faktor Determinasinya*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Skripsi.

- Jhingan M.L. 2010, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, edisi ketigabelas, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2011. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*. World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank. Diakses dari: <http://papers.ssrn.com>
- Maasyirah, A., 2011. *Analisis Mutu Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2000-2009*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Skripsi
- Mangkoesobroto, Guritno, 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. Gregory, 2007. *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.
- Mulyadi S. 2003, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paramita, Ahsani, 2012. *Analisis Dampak Realisasi APBD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar Periode 2000-2009*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Putri, Febriani Irma, 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Human Development Index (HDI) di Indonesia (Periode 1991-2008)*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Romer dan Weil, 2002. *A Contribution to the Empirics of Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics: www.google.com
- Rustiono, Deddy SE., 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Sari, Aryunita, 2013. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Modal Manusia Terhadap Pdb Riil Di Indonesia Periode 2003-2012*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Sjafii, Achmad, 2005. *Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Strauss and Thomas, 1998. *Human resources: Empirical modeling of household and family decisions*. Journal of economic literature.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi, Jakarta.
- Sumarso, Sonny, 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Supranto J., 2009. *Statistik: Teori dan Aplikasi*, edisi ketujuh, Erlangga, Jakarta.

- Todaro, Michael, P. Dan Stephen C. Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi*, edisi kesembilan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Usmaliadanti, Christina, 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro. Skripsi.
- Wagiono, Yayat K., 1994. *Berbagai Penelitian Sosial Ekonomi*. Dalam Bungaran Saragit dkk (Editor). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Winarno Wing Wahyu, 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews 7.0*. UPP STIM YKPM.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2008

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.01.1.01.01.00.00.4	Pendapatan	20.000.000,00	32,168,500.00	(12,168,500.00)	160.84
1.01.1.01.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.000.000,00	32,168,500.00	(12,168,500.00)	160.84
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.000.000,00	32,168,500.00	(12,168,500.00)	160.84
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	20.000.000,00	32,168,500.00	(12,168,500.00)	160.84
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.01.11	Retribusi Jasa Ketatausahaan	20.000.000,00	32,168,500.00	(12,168,500.00)	160.84
1.01.1.01.01.00.00.5	Belanja	96,952,093,976.00	96,996,295,530.00	(44,201,554.00)	100.05
1.01.1.01.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	64,270,674,101.00	64,698,802,108.00	(428,128,007.00)	100.67
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	64,270,674,101.00	64,698,802,108.00	(428,128,007.00)	100.67
1.01.1.01.01.01.01.5.2	Belanja Langsung	32,681,419,875.00	32,297,493,422.00	383,926,453.00	98.83
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,267,848,525.00	3,073,289,222.00	194,559,303.00	94.05
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,439,454,800.00	1,426,308,300.00	13,146,500.00	99.09
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92,362,400.00	63,781,400.00	28,581,000.00	69.06
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49,994,400.00	49,994,400.00	0.00	100.00
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	94,131,500.00	94,036,500.00	95,000.00	99.90
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	22,586,007,950.00	22,507,616,850.00	78,391,100.00	99.65
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	3,602,343,050.00	3,585,829,050.00	16,514,000.00	99.54
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	196,167,000.00	195,642,000.00	525,000.00	99.73
1.01.1.01.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	205,940,600.00	205,920,600.00	20,000.00	99.99
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	352,959,750.00	339,479,750.00	13,480,000.00	96.18
1.01.1.01.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	12,760,750.00	12,760,750.00	0.00	100.00
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	467,281,300.00	432,887,550.00	34,393,750.00	92.64
1.18.1.01.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	124,218,000.00	123,318,000.00	900,000.00	99.28
1.18.1.01.01.18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	21,521,300.00	21,200,500.00	320,800.00	98.51
1.18.1.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	134,824,050.00	131,824,050.00	3,000,000.00	97.77
1.18.1.01.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	33,604,500.00	33,604,500.00	0.00	100.00

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lanjutan..

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2008

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.02.1.02.01.00.00.4	Pendapatan	845,804,000.00	1,082,956,142.00	(237,152,142.00)	128.04
1.02.1.02.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	845,804,000.00	1,082,956,142.00	(237,152,142.00)	128.04
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	845,804,000.00	1,082,956,142.00	(237,152,142.00)	128.04
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	845,804,000.00	1,082,956,142.00	(237,152,142.00)	128.04
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	827,475,000.00	1,034,324,142.00	(206,849,142.00)	125.00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.11	Retribusi Jasa Ketatausahaan	18,329,000.00	48,632,000.00	(30,303,000.00)	265.33
1.02.1.02.01.00.00.5	Belanja	25,981,205,580.00	25,516,192,592.00	465,012,988.00	98.21
1.02.1.02.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	12,951,280,875.00	12,706,747,061.00	244,533,814.00	98.11
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	12,951,280,875.00	12,706,747,061.00	244,533,814.00	98.11
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	12,951,280,875.00	12,706,747,061.00	244,533,814.00	98.11
1.02.1.02.01.01.01.5.2	Belanja Langsung	13,029,924,705.00	12,809,445,531.00	220,479,174.00	98.31
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Perkantoran	1,294,364,750.00	1,103,081,841.00	191,282,909.00	85.22
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	394,531,500.00	393,713,900.00	817,600.00	99.79
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	370,759,790.00	323,788,000.00	46,971,790.00	87.33
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55,673,650.00	35,673,650.00	20,000,000.00	64.08
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,382,069,705.00	1,524,445,885.00	(142,376,180.00)	110.30
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8,922,905,310.00	8,851,101,955.00	71,803,355.00	99.20
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	23,655,700.00	20,655,700.00	3,000,000.00	87.32
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	119,934,800.00	119,549,800.00	385,000.00	99.68
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	129,798,500.00	129,798,500.00	0.00	100.00
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	46,181,000.00	41,211,000.00	4,970,000.00	89.24
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	274,375,000.00	253,574,500.00	20,800,500.00	92.42
1.02.1.02.01.31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	15,675,000.00	12,850,800.00	2,824,200.00	81.98

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI APBD
Tahun Anggaran 2009

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.00.00.4	Pendapatan	20.000.000,00	25.357.000,00	(5.357.000,00)	126,79
1.01.1.01.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.000.000,00	25.357.000,00	(5.357.000,00)	126,79
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.000.000,00	25.357.000,00	(5.357.000,00)	126,79
1.01.1.01.01.00.00.5	Belanja	120.312.161.626,00	123.075.040.434,00	(2.762.878.808,00)	102,30
1.01.1.01.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	69.684.074.101,00	72.732.458.500,00	(3.048.384.399,00)	104,37
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	69.684.074.101,00	72.732.458.500,00	(3.048.384.399,00)	104,37
1.01.1.01.01.01.01.5.2	Belanja Langsung	50.628.087.525,00	50.342.581.934,00	285.505.591,00	99,44
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.537.344.525,00	2.323.081.539,00	214.262.986,00	91,56
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	491.197.000,00	482.464.475,00	8.732.525,00	98,22
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63.781.000,00	61.176.200,00	2.604.800,00	95,92
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.343.000,00	46.343.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	908.715.000,00	908.610.000,00	105.000,00	99,99
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	43.475.288.450,00	43.438.548.620,00	36.739.830,00	99,92
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	653.371.800,00	651.251.800,00	2.120.000,00	99,68
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	441.900.500,00	439.800.500,00	2.100.000,00	99,52
1.01.1.01.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	202.772.750,00	202.772.750,00	0,00	100,00
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	816.913.000,00	806.349.800,00	10.563.200,00	98,71
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	584.764.300,00	576.807.050,00	7.957.250,00	98,64
1.18.1.01.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	137.503.000,00	137.503.000,00	0,00	100,00
1.18.1.01.01.18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	18.533.200,00	18.213.200,00	320.000,00	98,27
1.18.1.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	249.660.000,00	249.660.000,00	0,00	100,00

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lanjutan..

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI APBD
Tahun Anggaran 2009

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.00.00.4	Pendapatan	1.774.806.900,00	1.753.565.825,00	21.241.075,00	98,80
1.02.1.02.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.774.806.900,00	1.753.565.825,00	21.241.075,00	98,80
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.774.806.900,00	1.753.565.825,00	21.241.075,00	98,80
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.774.806.900,00	1.753.565.825,00	21.241.075,00	98,80
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.726.706.900,00	1.727.423.825,00	(716.925,00)	100,04
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.11	Retribusi Jasa Ketatausahaan	48.100.000,00	26.142.000,00	21.958.000,00	54,35
1.02.1.02.01.00.00.5	Belanja	28.576.266.108,00	28.748.437.564,00	(172.171.456,00)	100,60
1.02.1.02.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	14.460.086.875,00	15.119.146.649,00	(659.059.774,00)	104,56
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	14.460.086.875,00	15.119.146.649,00	(659.059.774,00)	104,56
1.02.1.02.01.01.01.5.2	Belanja Langsung	14.116.179.233,00	13.629.290.915,00	486.888.318,00	96,55
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.078.579.800,00	989.354.054,00	89.225.746,00	91,73
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	492.089.000,00	491.663.198,00	425.802,00	99,91
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	224.879.571,00	220.144.000,00	4.735.571,00	97,89
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.864.400,00	41.864.400,00	0,00	100,00
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.424.507.852,00	1.411.726.053,00	12.781.799,00	99,10
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10.338.183.860,00	9.975.730.960,00	362.452.900,00	96,49
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	33.610.000,00	33.010.000,00	600.000,00	98,21
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	81.243.900,00	79.687.900,00	1.556.000,00	98,08
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	100.645.000,00	100.617.000,00	28.000,00	99,97
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	43.082.050,00	42.958.050,00	124.000,00	99,71
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	257.493.800,00	242.535.300,00	14.958.500,00	94,19

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lampiran 3

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2010

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.01.1.01.01.00.00.4	Pendapatan	20.000.000,00	39.528.500,00	(19.528.500,00)	197,64
	Pendapatan Asli Daerah	20.000.000,00	39.528.500,00	(19.528.500,00)	197,64
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.000.000,00	39.528.500,00	(19.528.500,00)	197,64
	Jumlah Pendapatan	20.000.000,00	39.528.500,00	(19.528.500,00)	197,64
1.01.1.01.01.00.00.5	Belanja	165.739.372.460,00	156.684.618.182,00	9.054.754.278,00	94,54
	Belanja Tidak Langsung	125.758.360.460,00	123.981.704.821,00	1.776.655.639,00	98,59
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	125.758.360.460,00	123.981.704.821,00	1.776.655.639,00	98,59
	Belanja Langsung	39.981.012.000,00	32.702.913.361,00	7.278.098.639,00	81,80
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.510.800.950,00	1.411.393.047,00	99.407.903,00	93,42
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	295.150.000,00	153.446.750,00	141.703.250,00	51,99
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63.781.000,00	20.510.000,00	43.271.000,00	32,16
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	58.323.000,00	58.283.000,00	40.000,00	99,93
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	35.763.612.095,00	28.872.703.114,00	6.890.908.981,00	80,73
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	1.183.017.455,00	1.122.922.450,00	60.095.005,00	94,92
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	80.090.500,00	80.090.500,00	0,00	100,00
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	106.582.750,00	102.427.750,00	4.155.000,00	96,10
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	494.339.250,00	456.822.250,00	37.517.000,00	92,41
1.01.1.01.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	151.999.000,00	150.999.000,00	1.000.000,00	99,34
1.01.1.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	253.316.000,00	253.315.500,00	500,00	100,00
	Jumlah Belanja	165.739.372.460,00	156.684.618.182,00	9.054.754.278,00	94,54
	Surplus / (Defisit)	(165.719.372.460,00)	(156.645.089.682,00)	(9.074.282.778,00)	94,52

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lanjutan..

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2010

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.02.1.02.01.00.00.4	Pendapatan	1.700.000.000,00	1.665.869.400,00	34.130.600,00	97,99
	Pendapatan Asli Daerah	1.700.000.000,00	1.665.869.400,00	34.130.600,00	97,99
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.700.000.000,00	1.665.869.400,00	34.130.600,00	97,99
	Jumlah Pendapatan	1.700.000.000,00	1.665.869.400,00	34.130.600,00	97,99
1.02.1.02.01.00.00.5	Belanja	25.343.631.700,00	24.979.268.611,00	364.363.089,00	98,56
	Belanja Tidak Langsung	16.619.905.000,00	16.625.630.507,00	(5.725.507,00)	100,03
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	16.619.905.000,00	16.625.630.507,00	(5.725.507,00)	100,03
	Belanja Langsung	8.723.726.700,00	8.353.638.104,00	370.088.596,00	95,76
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.081.292.150,00	1.030.486.153,00	50.805.997,00	95,30
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	416.699.500,00	416.689.876,00	9.624,00	100,00
1.02.1.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.677.000,00	26.860.000,00	817.000,00	97,05
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99.600.000,00	83.017.000,00	16.583.000,00	83,35
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.890.000,00	17.890.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	81.376.700,00	61.973.000,00	19.403.700,00	76,16
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6.463.437.850,00	6.195.708.575,00	267.729.275,00	95,86
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	82.396.800,00	75.348.800,00	7.048.000,00	91,45
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	120.504.000,00	120.227.000,00	277.000,00	99,77
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	46.550.400,00	46.550.400,00	0,00	100,00
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	248.852.300,00	241.437.300,00	7.415.000,00	97,02
	Jumlah Belanja	25.343.631.700,00	24.979.268.611,00	364.363.089,00	98,56
	Surplus / (Defisit)	(23.643.631.700,00)	(23.313.399.211,00)	(330.232.489,00)	98,60

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2011

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.01.1.01.01.00.00.4	Pendapatan	0,00	898.594,00	(898.594,00)	100,00
	Pendapatan Asli Daerah	0,00	898.594,00	(898.594,00)	100,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	898.594,00	(898.594,00)	100,00
	Jumlah Pendapatan	0,00	898.594,00	(898.594,00)	100,00
1.01.1.01.01.00.00.5	Belanja	249.157.906.865,00	245.546.703.006,00	3.611.203.859,00	98,55
	Belanja Tidak Langsung	192.362.101.765,00	191.942.378.649,00	419.723.116,00	99,78
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	192.362.101.765,00	191.942.378.649,00	419.723.116,00	99,78
	Belanja Langsung	56.795.805.100,00	53.604.324.357,00	3.191.480.743,00	94,38
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.614.380.300,00	1.539.829.882,00	74.550.418,00	95,38
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	348.290.800,00	346.336.980,00	1.953.820,00	99,44
1.01.1.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63.781.000,00	62.889.000,00	892.000,00	98,60
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.410.000,00	8.409.900,00	100,00	100,00
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	224.561.000,00	220.361.000,00	4.200.000,00	98,13
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	52.824.150.000,00	49.981.982.545,00	2.842.167.455,00	94,62
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	495.934.000,00	451.053.300,00	44.880.700,00	90,95
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	211.350.000,00	211.350.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	74.787.500,00	65.682.500,00	9.105.000,00	87,83
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	486.098.500,00	434.003.900,00	52.094.600,00	89,28
1.01.1.01.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	137.206.500,00	136.206.500,00	1.000.000,00	99,27
1.01.1.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	276.855.500,00	116.218.850,00	160.636.650,00	41,98
	Jumlah Belanja	249.157.906.865,00	245.546.703.006,00	3.611.203.859,00	98,55
	Surplus / (Defisit)	(249.157.906.865,00)	(245.545.804.412,00)	(3.612.102.453,00)	98,55

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lanjutan..

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2011

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.02.1.02.01.00.00.4	Pendapatan	1.869.044.000,00	2.163.026.540,00	(293.982.540,00)	115,73
	Pendapatan Asli Daerah	1.869.044.000,00	2.163.026.540,00	(293.982.540,00)	115,73
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.869.044.000,00	2.162.924.540,00	(293.880.540,00)	115,72
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	102.000,00	(102.000,00)	100,00
	Jumlah Pendapatan	1.869.044.000,00	2.163.026.540,00	(293.982.540,00)	115,73
1.02.1.02.01.00.00.5	Belanja	28.511.318.643,00	28.318.514.070,00	192.804.573,00	99,32
	Belanja Tidak Langsung	19.399.778.638,00	19.368.613.720,00	31.164.918,00	99,84
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	19.399.778.638,00	19.368.613.720,00	31.164.918,00	99,84
	Belanja Langsung	9.111.540.005,00	8.949.900.350,00	161.639.655,00	98,23
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.120.072.305,00	1.086.390.904,00	33.681.401,00	96,99
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	444.584.100,00	444.581.326,00	2.774,00	100,00
1.02.1.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.355.000,00	32.355.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	46.500.000,00	46.419.280,00	80.720,00	99,83
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.137.500,00	15.027.500,00	110.000,00	99,27
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	815.512.000,00	814.484.500,00	1.027.500,00	99,87
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6.241.217.500,00	6.137.371.990,00	103.845.510,00	98,34
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	22.750.000,00	20.800.000,00	1.950.000,00	91,43
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	43.010.000,00	42.985.000,00	25.000,00	99,94
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	60.650.000,00	60.385.000,00	265.000,00	99,56
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	35.825.000,00	35.550.000,00	275.000,00	99,23
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	133.926.600,00	120.077.100,00	13.849.500,00	89,66
1.02.1.02.01.32	Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Sarana Industri serta Mutu Produksi	100.000.000,00	93.472.750,00	6.527.250,00	93,47
	Jumlah Belanja	28.511.318.643,00	28.318.514.070,00	192.804.573,00	99,32
	Surplus / (Defisit)	(26.642.274.643,00)	(26.155.487.530,00)	(486.787.113,00)	98,17

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2012

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.01.1.01.01.00.00.5	Belanja	310,492,455,008.00	298,648,013,901.00	(11,844,441,107.00)	96.19
	Belanja Tidak Langsung	273,049,167,298.00	263,827,575,088.00	(9,221,592,210.00)	96.62
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	273,049,167,298.00	263,827,575,088.00	(9,221,592,210.00)	96.62
	Belanja Langsung	37,443,287,710.00	34,820,438,813.00	(2,622,848,897.00)	93.00
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,248,356,420.00	1,132,634,155.00	(115,722,265.00)	90.73
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76,116,000.00	45,320,805.00	(30,795,195.00)	59.54
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76,116,000.00	45,320,805.00	(30,795,195.00)	59.54
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	469,900,000.00	453,442,600.00	(16,457,400.00)	96.50
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67,305,000.00	58,263,300.00	(9,041,700.00)	86.57
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	50,638,480.00	49,442,400.00	(1,196,080.00)	97.64
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,092,770,000.00	953,820,850.00	(138,949,150.00)	87.28
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	22,353,945,410.00	21,850,421,778.00	(503,523,632.00)	97.75
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	10,417,199,400.00	8,792,782,830.00	(1,624,416,570.00)	84.41
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	91,755,000.00	80,972,500.00	(10,782,500.00)	88.25
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	459,455,400.00	354,937,300.00	(104,518,100.00)	77.25
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	553,415,500.00	542,138,950.00	(11,276,550.00)	97.96
1.01.1.01.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	231,414,000.00	222,884,000.00	(8,530,000.00)	96.31
1.01.1.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	269,478,000.00	217,328,000.00	(52,150,000.00)	80.65
1.01.1.01.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	137,655,100.00	111,370,150.00	(26,284,950.00)	80.91

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lanjutan..

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2012

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.02.1.02.01.00.00.4	Pendapatan	4,147,523,900.00	3,360,829,262.00	(786,694,638.00)	81.03
	Pendapatan Asli Daerah	4,147,523,900.00	3,360,829,262.00	(786,694,638.00)	81.03
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,147,523,900.00	3,360,829,262.00	(786,694,638.00)	81.03
1.02.1.02.01.00.00.5	Belanja	35,389,671,708.00	32,586,248,266.00	(2,803,423,442.00)	92.08
	Belanja Tidak Langsung	22,157,755,408.00	21,262,438,250.00	(895,317,158.00)	95.96
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	22,157,755,408.00	21,262,438,250.00	(895,317,158.00)	95.96
	Belanja Langsung	13,231,916,300.00	11,323,810,016.00	(1,908,106,284.00)	85.58
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	906,506,750.00	880,420,146.00	(26,086,604.00)	97.12
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	850,581,895.00	794,201,995.00	(56,379,900.00)	93.37
1.02.1.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10,000,000.00	10,000,000.00	(-)	100.00
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	46,500,000.00	41,004,000.00	(5,496,000.00)	88.18
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	23,300,000.00	23,300,000.00	(-)	100.00
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	566,292,605.00	559,319,391.00	(6,973,214.00)	98.77
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	30,000,000.00	24,330,000.00	(5,670,000.00)	81.10
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	43,010,000.00	43,010,000.00	(-)	100.00

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Lampiran 6

**Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (*Time Lag t-1*),
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (*Time Lag t-1*),
Pendapatan per Kapita (*Time Lag t-1*),
dan Indeks Pendidikan
Tahun 2003-2012**

TAHUN	PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN (X1) (t-1)	PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN (X2) (t-1)	PENDAPATAN PER KAPITA (Y1) (t-1)	INDEKS PENDIDIKAN (Y2)
2003	Rp. 16.874.387.222	Rp. 9.876.998.324	Rp. 3.617.929	67,92
2004	Rp. 19.765.347.987	Rp. 10.785.586.823	Rp. 3.758.525	68,87
2005	Rp. 20.675.239.365	Rp. 12.354.786.242	Rp. 3.875.830	69,84
2006	Rp. 22.678.485.176	Rp. 15.897.567.200	Rp. 3.897.429	70,20
2007	Rp. 61.839.235.267	Rp. 18.787.556.155	Rp. 4.195.865	71,60
2008	Rp. 71.959.497.190	Rp. 21.649.407.128	Rp. 4.403.754	71,60
2009	Rp. 96.996.295.530	Rp. 25.516.192.592	Rp. 4.718.068	72,24
2010	Rp. 123.075.040.434	Rp. 28.748.437.564	Rp. 5.012.040	73,90
2011	Rp. 156.684.618.182	Rp. 24.979.268.611	Rp. 5.396.980	73,99
2012	Rp. 245.546.703.006	Rp. 28.318.514.070	Rp. 5.768.119	74,18

Lampiran 7

Hasil LN Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendapatan per Kapita, dan Indeks Pendidikan Tahun 2003-2012

TAHUN	LN X1	LN X2	LN Y1	Y2
2003	23,55	23,01	15,10	67,92
2004	23,71	23,10	15,14	68,87
2005	23,75	23,24	15,17	69,84
2006	23,84	23,49	15,18	70,20
2007	24,85	23,66	15,25	71,60
2008	25,00	23,80	15,30	71,60
2009	25,30	23,96	15,37	72,24
2010	25,54	24,08	15,43	73,90
2011	25,78	23,94	15,50	73,99
2012	26,23	24,07	15,57	74,18

Lampiran 8

Hasil Pengujian dengan Menggunakan EViews 7.0 untuk Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y_1

Dependent Variable: Y1

Method: Least Squares

Date: 12/19/13 Time: 05:42

Sample: 2003 2012

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.02440	1.392753	8.633552	0.0001
X1	0.181249	0.040211	4.507512	0.0028
X2	-0.051247	0.097273	-0.526834	0.6146
R-squared	0.957466	Mean dependent var		15.29981
Adjusted R-squared	0.945313	S.D. dependent var		0.160887
S.E. of regression	0.037624	Akaike info criterion		-3.479040
Sum squared resid	0.009909	Schwarz criterion		-3.388265
Log likelihood	20.39520	Hannan-Quinn criter.		-3.578621
F-statistic	78.78710	Durbin-Watson stat		1.357236
Prob(F-statistic)	0.000016			

Lampiran 9

Hasil Pengujian dengan Menggunakan EViews 7.0 untuk Pengaruh X_1 , X_2 , dan Y_1 terhadap Y_2

Dependent Variable: Y2

Method: Least Squares

Date: 12/19/13 Time: 05:55

Sample: 2003 2012

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.620695	0.810870	1.998710	0.0926
X1	-0.005003	0.013551	-0.369207	0.7247
X2	0.045045	0.016919	2.662318	0.0374
Y1	0.111561	0.064476	1.730279	0.1343
R-squared	0.971391	Mean dependent var		4.268343
Adjusted R-squared	0.957087	S.D. dependent var		0.030982
S.E. of regression	0.006418	Akaike info criterion		-6.970211
Sum squared resid	0.000247	Schwarz criterion		-6.849177
Log likelihood	38.85106	Hannan-Quinn criter.		-7.102985
F-statistic	67.90848	Durbin-Watson stat		2.170805
Prob(F-statistic)	0.000051			



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU**

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500/IP/KPT/XI/2013

DASAR	1. Surat Permohonan AHYADI JUSAEMAN	Tanggal 25-11-2013
	2. Rekomendasi dari BAPPEDA	
	Nomor 070/506/Bap/XI/2013	Tanggal 26-11-2013

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **AHYADI JUSAEMAN**

ALAMAT : **JL. M. IDRIS NO. 257 LAJOA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPANGARUHI
PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA DI KABUPATEN SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **KABUPATEN SOPPENG**

JENIS PENELITIAN : **KUANTITATIF**

LAMA PENELITIAN : **27 November 2013 s.d 12 Desember 2013**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 27-11-2013

KEPALA KANTOR,



Drs. H. ANWAR MOEHADI, MM

Pangkat : PEMBINA TK. I

NIP : 19571231 198101 1 044



Lampiran 11

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JALAN SALOTUNGO NO. 3 TELEPON (0484) 21066 WATANSOPPENG – 90812

Watansoppeng, 23 Januari 2014

Nomor : 070/sz/DPPKAD/ I/2014

Kepada

Lampiran :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi

Perihal : **Bukti Penelitian**

Universitas Hasanuddin

di

Makassar

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Nomor 4652/UN4.5.1/PL.02/2013 tanggal 15 Nopember 2013 perihal izin penelitian, maka disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : AHYADI JUSAEMAN
 Nomor Induk : A 111 10 270
 Jurusan : Ilmu Ekonomi
 Tempat/tgl lahir : Pacongkang/02 Pebruari 1991
 Alamat : Perumahan Nusa Tamalanrea Indah (NTI)
 Blok DB 25 Makassar

Benar telah mengambil data di Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul :

" Analisis Faktor – Faktor Yang Mempegaruhi Peningkatan Mutu Modal Manusia di Kabupaten Soppeng "

Demikian penyampaian kami untuk di pergunakan seperlunya.

An. KEPALA DINAS PPKAD KAB.SOPPENG
KEPALA BIDANG AKUNTANSI

LIES UTINI, SE.M.Si

Lampiran 12**RIWAYAT HIDUP**

Ahyadi Jusaeman, Lahir tanggal 02 Februari 1991 di Pacongkang Kabupaten Soppeng sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Jusaeman Sahar dengan Hj. Rosnawati Tike.

Pendidikan Sekolah Dasar di jalani di SDN 211 Attang Benteng Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dan tamat tahun 2003, setelah itu melanjutkan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah di MTs As'adiyah Putera I Sengkang Kabupaten Wajo, tamat tahun 2006.

Lepas dari Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Putera I Sengkang Kabupaten Wajo, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Liliraja Kabupaten Soppeng dan selesai pada tahun 2009.

Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi, dan menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) nya pada tahun 2014.